

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan dinamika perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ditandai dengan semakin terbukanya persaingan antar bangsa, negara Indonesia memasuki era reformasi di berbagai bidang kehidupan menuju masyarakat yang lebih demokratis. Terwujudnya sebuah pemerintahan yang demokratis tidak terlepas dari peran serta tiap warga negaranya, termasuk generasi mudanya.

Di tahun peringatan seabad kebangkitan nasional kita, sejak didirikannya organisasi Budi Utomo oleh sejumlah mahasiswa Kedokteran STOVIA (*School tot Opleiding van Inlandsche Artsen-Sekolah Kedokteran Bumiputra*) yang dipelopori oleh Dr.Wahidin Sudirohusodo pada tanggal 20 Mei 1908 lalu, perlu kiranya ditegaskan lagi kepemilikan wawasan kebangsaan dan semangat nasionalisme serta patriotisme yang tinggi di kalangan generasi muda bangsa Indonesia untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam upaya mewujudkan sebuah kehidupan yang lebih demokratis.

Pernyataan ini didasari oleh fenomena memprihatinkan yang terjadi akhir-akhir ini terutama di kalangan sebagian generasi muda termasuk mahasiswa di dalamnya. Dewasa ini, semangat kebangsaan, rasa cinta tanah air (nasionalisme) serta patriotisme seakan meluntur seiring dengan bergulirnya berbagai permasalahan di negara kita di era reformasi ini. Generasi muda termasuk mahasiswa di dalamnya seolah abai terhadap karakteristik Identitas Nasional kita, kebanggaan sebagai bangsa Indonesiapun sirna sudah.

Tak dapat dipungkiri, di era reformasi yang terus bergulir, kita juga memasuki fase demokrasi yang tumbuh subur di tanah air. Kita harus meyakini bahwa demokrasi

yang kita jalankan sudah benar. Kita perlu meyakinkan semua pihak bahwa demokrasi yang kita jalankan telah sesuai dengan etika dan toleransi berdemokrasi. Kehidupan demokrasi yang kita lakukan telah sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945.

Pendidikan Kewarganegaraan, seperti yang dilakukan hampir di seluruh bangsa di dunia, dengan berbagai nama seperti: *civic education*, *citizenship education*, dan *democracy education*, mempunyai peran strategis dalam mempersiapkan warga negara yang cerdas, bertanggung jawab dan berkeadaban. Rumusan *Civics International* (1995) menyepakati bahwa “pendidikan demokrasi penting bagi pertumbuhan *civic culture* untuk keberhasilan pengembangan dan pemeliharaan pemerintahan demokrasi” (Azra, 2002).

Sebagai bagian dari Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), secara ideal Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) di Perguruan Tinggi memegang peranan untuk mengembangkan potensi mahasiswa sebagai Warga Negara Indonesia yang berkepribadian mantap serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Adapun aktualisasi dari Pendidikan Kewarganegaraan tersebut adalah melahirkan mahasiswa sebagai ilmuwan profesional sekaligus warga negara yang memiliki rasa kebangsaan, cinta tanah air (nasionalisme) dan jiwa patriotisme yang tinggi. Hal ini sesuai dengan paradigma Perguruan Tinggi Nasional yang telah dicanangkan untuk tahun 2003-2010 (DIKTI, 2005)

Atas dasar uraian tersebut di atas serta fenomena yang terjadi, Peneliti tertarik untuk melaksanakan suatu penelitian melalui judul, “Peran Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sarana pendidikan demokrasi dalam membangkitkan jiwa Nasionalis dan Patriotis mahasiswa” (Studi terhadap Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Bandung).

## 1.2. Rumusan Masalah

Pendidikan pada dasarnya adalah sebuah proses menuju kedewasaan berfikir peserta didik, sehingga ia dapat membangun dirinya, lingkungannya, bangsa serta negaranya. Senada dengan hal tersebut, Ki Hajar Dewantara Bapak Pendidikan Nasional kita menganggap “pendidikan sebagai daya upaya untuk mewujudkan pertumbuhan budi pekerti (kekuatan batin, karakter, pikiran [intelekt] dan tubuh anak) untuk memajukan kehidupan anak didik sesuai dengan dunianya”.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas dinyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (*citizenship education*) di Perguruan tinggi, sebagai unsur kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) dalam kurikulum Pendidikan Tinggi, diharapkan dapat memegang peran untuk “mengembangkan potensi mahasiswa Warga Negara Indonesia berkepribadian mantap, serta mempunyai tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.

Peran Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan tersebut dirasa semakin penting dan strategis, mengingat fenomena yang terjadi akhir-akhir ini dimana rasa nasionalisme dan patriotisme seolah meluntur terutama di kalangan generasi muda. Sejumlah mahasiswa pun seolah abai terhadap karakteristik Identitas Nasional bangsanya. Melalui Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sarana pendidikan demokrasi, diharapkan pemupukan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi mahasiswa calon cendekiawan, ilmuwan ataupun profesional yang berkemampuan kompetitif secara Internasional dapat dibangkitkan kembali bahkan ditingkatkan semaksimal mungkin dalam kehidupan sehari-hari.

Karenanya, kami memfokuskan penelitian ini pada masalah, “Sejauh mana peran Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sarana pendidikan demokrasi dalam membangkitkan jiwa Nasionalis dan Patriotis Mahasiswa”.

Berdasarkan pertanyaan pokok tersebut, secara operasional lingkup masalah penelitian ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan melemahnya jiwa nasionalis dan patriotis dalam diri mahasiswa ?
2. Seberapa besar andil Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sarana pendidikan demokrasi dalam membangkitkan jiwa nasionalis dan patriotis mahasiswa ?
3. Upaya-upaya apa yang dilakukan para Dosen Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan untuk menjadikan Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sarana pendidikan demokrasi dalam membangkitkan jiwa nasionalis dan patriotis mahasiswa ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui sejumlah faktor penyebab melemahnya jiwa nasionalis dan patriotis dalam diri mahasiswa
2. Untuk menemukan seberapa besar andil Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sarana pendidikan demokrasi dalam membangkitkan jiwa nasionalis dan patriotis di kalangan mahasiswa
3. Untuk mengetahui berbagai upaya yang dilakukan para Dosen Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dalam rangka mewujudkan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sarana demokrasi dalam membentuk jiwa nasionalis dan patriotis mahasiswa

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. *Secara teoritis*, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tambahan pentingnya peran Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sarana pendidikan demokrasi dalam membangkitkan jiwa Nasionalis dan Patriotis di kalangan mahasiswa.
2. *Secara praktis*, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pemikiran berbagai pihak yang berkepentingan dan bertanggung jawab dalam upaya meningkatkan wawasan kebangsaan, rasa cinta tanah air (nasionalisme) dan jiwa patriotisme terutama di kalangan generasi muda bangsa Indonesia.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1. Kajian teori

##### 2.1.1. Pengertian, Hakekat, Visi, Misi dan Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan dilakukan dan dikembangkan di seluruh dunia dengan berbagai istilah atau nama. Mata Kuliah ini sering disebut sebagai *civic education*, *citizenship education*, dan bahkan ada yang menyebut sebagai *democracy education*. Mata Kuliah ini memegang peran yang strategis dalam mempersiapkan warga negara yang cerdas, bertanggung jawab dan berkeadaban.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 43/DIKTI/KEP/2006, tanggal 2 Juni 2006 tentang “Rambu-rambu pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan tinggi”, terdiri atas Mata Kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan dan bahasa Indonesia. Dengan demikian Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bagian dari Kelompok Mata Kuliah pengembangan Kepribadian, yang dengan ketentuan tersebut di atas wajib diberikan di semua Fakultas dan Jurusan di seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia (**Kaelan, 2007:1**)

Pendidikan Kewarganegaraan diartikan sebagai program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan yang lain, *positive influence* pendidikan sekolah, masyarakat, orang tua, yang semuanya itu untuk pelajar-pelajar atau mahasiswa-mahasiswa berpikir kritis, analitis, bersikap dan

bertindak demokratis dalam persiapan *hidup demokrasi* (Nu'man Somantri dalam Sudirwo, 2006:2). Berkaitan dengan hal ini, Achmad Sanusi dalam Sudirwo (2006:2) menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan, sesuai predikatnya, bukan suatu program studi melainkan program pendidikan yang kepentingannya terletak pada negara, nilai-nilai dan dengan demikian pada cita-cita, emosi, sikap, cara, dan tingkah laku menurut keharusan atau kepatuhan sebagai warga negara yang baik.

Secara ideal, Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi memegang peran untuk mengembangkan potensi mahasiswa sebagai Warga Negara Indonesia yang berkepribadian mantap serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Adapun aktualisasi dari Pendidikan Kewarganegaraan tersebut adalah melahirkan mahasiswa sebagai ilmuwan profesional sekaligus Warga Negara Indonesia yang memiliki rasa cinta tanah air (nasionalisme) dan patriotisme (sikap kepahlawanan) yang tinggi.

Mansoer (2006) menyatakan bahwa penyempurnaan Kurikulum Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian berdasarkan Surat Keputusan Dirjen DIKTI No. 43/DIKTI/KEP/2006 tersebut di atas, mengakibatkan Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan memiliki paradigma baru, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan berbasis Pancasila. Kiranya akan menjadi sangat relevan jikalau Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi dewasa ini sebagai sistesis antara “*civic education*”, “*democracy education*”, serta “*citizenship education*” yang berlandaskan filsafat Pancasila serta mengandung muatan Identitas Nasional Indonesia, serta muatan makna Pendidikan Pendahuluan Bela Negara.

Adapun *Hakekat*, *Visi*, *Misi*, dan *Kompetensi* Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan Keputusan Dirjen DIKTI No.43/DIKTI/KEP/2006, dirumuskan sebagai berikut :

*Hakekat Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan* adalah untuk membekali dan memantapkan mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan dasar hubungan WNI yang Pancasilais dengan negara dan sesama warga negara.

*Visi Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan* adalah merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi, guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya.

*Misi Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan* adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan rasa tanggung jawab.

*Kompetensi Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan* adalah diharapkan mahasiswa menjadi ilmuwan yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis yang berkeadaban menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila.

### **2.1.2. Demokrasi, Pendidikan Demokrasi dan Demokratisasi**

Demokrasi bukan merupakan suatu istilah asing bagi kita semua. Hampir semua negara di dunia dewasa ini menamakan dirinya sebagai negara demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa gagasan demokrasi kini semakin mendunia dan diakui sebagai bentuk pemerintahan yang lebih baik dibandingkan dengan bentuk pemerintahan lain.



Namun demikian, pelaksanaan demokrasi di suatu negara tidak akan sama dengan di negara lain. Sebab ada sejumlah faktor yang mempengaruhi pelaksanaan demokrasi di suatu negara, seperti Ideologi, latar belakang sejarah, kondisi sosial budaya, tingkat kemajuan ekonomi dan sebagainya.

Di negara kita Indonesia, bentuk pemerintahan demokrasi dicita-citakan sejak awal. Sebagai bukti yuridisnya, Undang-undang Dasar 1945 sebelum amandemen dalam pasal 1 (2) menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Sementara itu, sesudah amandemenpun oleh bunyi pasal 1 (2) Undang-undang Dasar 1945 masih meyiratkan hal yang serupa, “Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-undang dasar”.

Secara khusus, perkembangan demokrasi dalam negara kebangsaan Indonesia dapat dikembalikan pada dinamika kehidupan bernegara Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 sampai saat ini, dengan mengacu kepada konstitusi yang pernah dan sedang berlaku, yakni UUD 1945, konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950, serta praksis kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang menjadi dampak langsung dan dampak pengiring dari berlakunya setiap konstitusi serta dampak perkembangan Internasional setiap jamnya itu (**Winataputra, 2006:12**).

#### **2.1.2.1. Pengertian Demokrasi**

Secara **etimologis**, **demokrasi** berasal dari bahasa **Yunani**, yaitu dari kata *demos* yang berarti *rakyat* dan *kratos* yang berarti *pemerintahan* atau *kratein* yang berarti *memerintah*. Demokrasi dapat diterjemahkan sebagai “rakyat berkuasa”. Dengan kata lain, demokrasi adalah pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat baik secara langsung ataupun tidak langsung (melalui perwakilan), setelah melalui proses

pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, atau yang sering diistilahkan sebagai Pemilu yang LUBER dan JURDIL. Dengan demikian, dalam suatu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, kekuasaan tertingginya ada di tangan rakyat. Sebagaimana pengertian demokrasi yang diucapkan oleh **Abraham Lincoln**, “*the government from the people, by the people and for the people*” (suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat).

Jadi, demokrasi berarti kekuasaan dari rakyat. Demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan rakyat yang berkuasa dan sekaligus diperintah. Pemerintahan dalam Negara demokrasi pada dasarnya adalah pilihan rakyat yang berdaulat dan diberi tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan negara, serta mempertanggungjawabkan pada rakyat. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat.

Secara historis, demokrasi telah tumbuh sejak zaman **Yunani Kuno** yaitu pada masa **Negara Kota** (*City State*) **Athena** sekitar abad ke-6 sampai abad ke-3 Sebelum Masehi. Sehingga sampai kini dikenal bahwa Negara kota Athena Kuno merupakan Negara demokrasi pertama di dunia yang mampu menjalankan demokrasi secara langsung dengan majelis sekitar 5000 sampai 6000 orang. Ketika itu, rakyat secara langsung menjadi penentu kebijakan pemerintahan, mereka dapat berkumpul di suatu tempat dalam waktu yang sama, berbicara dan memberikan suara secara langsung di dalam dewan sebagai forum penentu kebijakan. Namun, semua itu dapat terlaksana karena jumlah penduduk Negara Kota di Athena ketika itu baru sedikit. Agaknya, dengan kondisi seperti sekarang dimana jumlah penduduk sebuah kota sudah sangat besar ditambah tingkat permasalahan yang semakin kompleks, maka peluang untuk menjalankan demokrasi langsung sangat kecil, bahkan mustahil.

Dewasa ini, bentuk demokrasi paling umum dengan jumlah penduduk kota ratusan ribu bahkan jutaan orang adalah demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan.

Dalam demokrasi tidak langsung ini, para pejabat membuat undang-undang dan menjalankan program untuk kepentingan umum atas nama rakyat. Hak-hak rakyat dihormati dan dijunjung tinggi, karena pejabat itu dipilih dan diangkat oleh rakyat. Dalam demokrasi tidak dibenarkan adanya keputusan politik dari pejabat yang dapat merugikan hak-hak rakyat, apalagi kebijakan yang bertujuan untuk menindas rakyat demi kepentingan penguasa.

**Alamudi (1991)** berpendapat, demokrasi sesungguhnya bukan hanya seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk dalam sejarah panjang dan sering berliku-liku sehingga demokrasi sering disebut suatu *pelembagaan* dari kebebasan.

Ada 11 (sebelas) *Soko Guru Demokrasi* yang dikemukakan oleh **Alamudi (1991)**, yaitu :

1. Kedaulatan rakyat
2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah
3. Kekuasaan mayoritas
4. Hak-hak minoritas
5. Jaminan Hak Asasi Manusia
6. Pemilihan yang bebas dan jujur
7. Persamaan di depan hukum
8. Proses hukum yang wajar
9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional
10. Pluralisme sosial, ekonomi dan politik
11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan mufakat.

Selanjutnya ia menjelaskan bahwa dalam negara yang demokratis, warganya bebas mengambil keputusan melalui kekuasaan mayoritas, namun tidak benar bahwa kekuasaan mayoritas itu selalu demokratis. Suatu negara dapat dikatakan demokratis bila kekuasaan mayoritas disandingkan dengan jaminan Hak Asasi Manusia. Sehingga kelompok mayoritas dapat melindungi kaum minoritas, dan hak-hak minoritas tidak dapat dihapuskan oleh suara mayoritas.

**Ubaidillah** dalam **Sudirwo (2006:65)** mengemukakan prinsip-prinsip demokrasi adalah sebagai berikut :

1. Demokrasi yang bersifat umum yang menempatkan warga negara sebagai sumber utama kedaulatan
2. Mayoritas berkuasa dan terjadinya hak minoritas
3. Pembatasan pemerintahan
4. Pembatasan dan pemisahan kekuasaan negara yang meliputi :
  - a) pemisahan kekuasaan berdasarkan Trias Politika
  - b) kontrol keseimbangan lembaga-lembaga pemerintahan
  - c) adanya pemilihan umum sebagai mekanisme peralihan kekuasaan

Dalam perkembangannya, demokrasi telah mengalami pasang surut. Hal ini ditandai antara lain dengan adanya istilah atau nama dari demokrasi yang menunjukkan bentuk pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi di suatu Negara.

**Budiardjo (1989)** mengategorikan aliran/tipe demokrasi menjadi dua bagian yaitu :

- 1). *Demokrasi Konstitusional*, adalah demokrasi yang berawal dari gagasan bahwa Pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya Dan tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tersebut tercantum dalam konstitusi.

Oleh karena itu, sering disebut pemerintahan berdasarkan konstitusi.

Demokrasi konstitusional banyak diterapkan di berbagai negara dengan berbagai variasi., misalnya dengan nama demokrasi liberal yang banyak diterapkan di Negara Barat.

Demokrasi Pancasila yang diterapkan di Indonesia dapat juga dikategorikan ke dalam tipe demokrasi Konstitusional.

2). *Demokrasi/Demokrasi Rakyat*, merupakan tipe demokrasi yang lebih mendasarkan diri pada komunisme. Tipe demokrasi ini banyak dianut oleh negara-negara komunis di Eropa Timur, juga di RRC dan Korea Utara.

Oleh para pendukung Demokrasi Konstitusional, tipe Demokrasi/Demokrasi Rakyat ini dianggap tidak demokratis. Sebab, menurut peristilahan komunis, Demokrasi Rakyat adalah bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi *diktatur proletariat*.

**Bahmueller (1996)** menyatakan, bahwa ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi penegakkan demokrasi konstitusional di suatu negara, yakni *faktor ekonomi, faktor sosial dan politik dan faktor budaya kewarganegaraan dan akar sejarah*. Penjelasan secara lebih terperinci adalah sebagai berikut :

(1) *faktor ekonomi*.

Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan factor yang sangat penting dalam pelaksanaan demokrasi di Negara tertentu. Hal ini tidak berarti bahwa negara-negara miskin tidak dapat menerapkan demokrasi atau Negara kaya akan selalu demokratis. Namun demikian, kesejahteraan masyarakat umumnya menjadi faktor utama untuk menentukan suatu negara itu demokratis atau tidak. Dengan kata lain, apabila suatu Negara ingin hidup demokratis maka negara tersebut harus dapat melewati status negara miskin dalam pertumbuhan ekonominya

Ada sejumlah alasan mengapa *ekonomi* menjadi *faktor utama bagi status negara demokrasi*, yaitu *pertama*, pertumbuhan ekonomi akan dapat mencerdaskan masyarakat dan masyarakat yang cerdas merupakan salah satu kriteria bahkan syarat suatu masyarakat demokratis. *Kedua*, selain dapat meningkatkan kecerdasan masyarakat, pertumbuhan ekonomi juga dapat menimbulkan proses urbanisasi. Proses ini dapat dijadikan sebagai indikator pra kondisi keberhasilan demokratisasi. Pertumbuhan kota dapat mendorong pengembangan **masyarakat madani** (*civil society*).

(2) *faktor sosial dan politik*

Faktor penting yang berkaitan dengan pembangunan demokrasi di suatu negara dan mungkin sering diabaikan adalah masalah perasaan kesatuan nasional atau identitas sebagai bangsa. Nasionalisme dalam konteks ini diartikan sebagai semangat kebangsaan dan bernegara dari setiap individu dalam suatu negara untuk menegakkan pemerintahan sendiri dan menjalankan demokrasi. Salah satu kesulitan hidup berdemokrasi adalah ketika terdapatnya masyarakat yang secara etnis terpisah-pisah dalam friksi-friksi golongan.

Dalam hal ini, karakter dan tingkat keretakan sosial merupakan faktor utama. Jiwa manusia sudah tak berharga lagi dalam situasi perang antar etnis. Oleh karena itu, faktor sosial dan politik, khususnya upaya pembangunan bangsa, *nations and character building* sangat penting dalam mewujudkan suatu masyarakat dan negara demokratis.

(3) *factor budaya kewarganegaraan dan akar sejarah*

Budaya kewarganegaraan dan akar sejarah suatu bangsa ternyata memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan dan pembangunan masyarakat demokrasi.

**Robert Putnam** (dalam **Bahmueller, 1996**) dalam penelitiannya selama lebih dari 20 tahun di Italia menyimpulkan, bahwa daerah-daerah yang memiliki tradisi kuat dalam nilai-nilai kewarganegaraan menunjukkan tingkat efektivitas paling tinggi dalam upaya pembangunan demokrasi. Wilayah yang berhasil menerapkan system pemerintahan demokratis ini disebut masyarakat *civic* (berkewarganegaraan) atau dikenal pula dengan *community civic*. Masyarakat demikian, memiliki ciri-ciri adanya keterikatan berkewarganegaraan, berpartisipasi secara aktif, dan tertarik dengan masalah-masalah public (*civic virtue*). Dalam masyarakat tersebut terdapat hubungan politik yang berdasarkan asas persamaan derajat, tidak hierarki, saling percaya, solidaritas, dan toleransi antar sesama.

#### **2.1.2.2. Pendidikan Demokrasi dan Demokratisasi**

*Pendidikan Demokrasi* diartikan sebagai upaya sistematis yang dilakukan Negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warganegaranya agar memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan konsep, prinsip, dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya dalam masyarakat (**Winataputra, 2006:12**).

Demokrasi memang tidak diwariskan, tetapi ditangkap dan dicerna melalui proses belajar. Oleh karena itu, untuk memahaminya diperlukan suatu proses pendidikan demokrasi.

Hal ini sesuai dengan kesepakatan Civitas International di tahun 1995, bahwa Pendidikan demokrasi penting bagi penumbuhan “civic culture” untuk keberhasilan pengembangan dan pemeliharaan pemerintahan demokrasi (**Azra, 2002**). Sejalan dengan hal tersebut, dalam **pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003** tentang **Sistem**

**Pendidikan Nasional** dinyatakan bahwa **Tujuan Pendidikan Nasional** adalah, “Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

*Pendidikan demokrasi* dalam berbagai konteks, dalam hal ini untuk pendidikan formal (di sekolah dan perguruan tinggi), nonformal (pendidikan di luar sekolah) dan informal (pergaulan di rumah dan masyarakat) mempunyai *visi* sebagai wahana *substantive, pedagogis, dan social-kultural* untuk membangun cita-cita, nilai, konsep, prinsip, sikap, dan keterampilan demokrasi dalam diri warga negaranya melalui pengalaman hidup dan berkehidupan demokrasi dalam berbagai konteks **(Winataputra, 2006:19)**.

Adapun *misi pendidikan demokrasi* adalah sebagai berikut :

- Memfasilitasi warganegara untuk mendapatkan berbagai akses dan menggunakan secara cerdas berbagai sumber informasi (tercetak, terekam, tersiar, elektronik, kehidupan, dan lingkungan) tentang demokrasi dalam teori dan praktek untuk berbagai konteks kehidupan sehingga ia memiliki wawasan yang luas dan memadai (*well-informed*).
- Memfasilitasi warganegara untuk dapat melakukan kajian konseptual dan operasional secara cermat dan bertanggungjawab terhadap berbagai cita-cita, instrumentasi, dan praksis demokrasi guna mendapatkan keyakinan dalam melakukan pengambilan keputusan individual dan atau kelompok dalam kehidupannya sehari-harinya serta berargumentasi atas keputusannya itu.
- Memfasilitasi warganegara untuk memperoleh dan memanfaatkan kesempatan berpartisipasi secara cerdas dan bertanggungjawab dalam praksis kehidupan



demokrasi di lingkungannya, seperti mengeluarkan pendapat, berkumpul dan berserikat, memilih, serta memonitor dan mempengaruhi kebijakan publik.

Sistem pemerintahan demokrasi banyak dicita-citakan oleh berbagai negara. Namun upaya untuk menuju kehidupan demokrasi yang ideal tidaklah mudah. Proses menuju demokrasi inilah yang disebut *demokratisasi* (**Budiyanto, 2004:122**).

Jadi, demokratisasi adalah proses mengimplementasikan demokrasi sebagai sistem politik dalam kehidupan bernegara. Tanpa usaha mengimplementasikan/melembagakan demokrasi mustahil sistem politik demokrasi itu menjadi terbentuk.

*Demokratisasi* bertujuan menghasilkan demokrasi yang mengacu pada ciri-ciri sebagai berikut :

- a) Proses yang tak pernah selesai; dalam arti bertahap, berkesinambungan, terus-menerus
- b) Bersifat evolusioner; dalam arti dilakukan secara perlahan, bagian demi bagian
- c) Perubahan bersifat damai; dalam arti tanpa kekerasan (anarkhis)
- d) Berjalan melalui cara musyawarah; dalam arti perbedaan yang ada diselesaikan dengan cara musyawarah

Selanjutnya, **Winataputra (2006:13)** juga menyatakan pada tataran praksis dimana terjadi pertarungan antara nilai-nilai ideal, nilai instrumental, dengan konteks alam, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan agama serta kualitas psiko-sosial para penyelenggara Negara, memang harus diakui bahwa proses demokratisasi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia sampai saat ini masih belum mencapai taraf yang membanggakan dan membahagiakan. Oleh karenanya,

merupakan kewajiban kita semua sebagai bangsa Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokratisasi ini dengan penuh tanggung jawab.

**Zamroni (2001)** menyatakan, “Demokrasi akan tumbuh kokoh bila di kalangan masyarakat tumbuh kultur dan nilai-nilai demokrasi sebagai berikut :

- a) Toleransi
- b) Bebas mengemukakan dan menghormati perbedaan pendapat
- c) Memahami keanekaragaman dalam masyarakat
- d) Terbuka dalam berkomunikasi
- e) Menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan
- f) Percaya diri atau tidak tergantung pada orang lain
- g) Saling menghargai
- h) Mampu mengekang diri
- i) Kebersamaan dan keseimbangan

Masyarakat yang menerima dan melaksanakan terus menerus nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan akan menghasilkan *budaya demokrasi*. Jadi, budaya demokrasi di masyarakat akan terbentuk bilamana nilai-nilai demokrasi itu sudah berkembang luas, merata, dihayati dan dijalankan sebagai sikap dan perilaku hidup.

Pada akhirnya, budaya demokrasi akan mengembangkan nilai-nilai demokrasi.

Contoh : di suatu masyarakat yang sudah memiliki budaya demokrasi, akan menentang segala bentuk kekerasan terhadap sesamanya.. Sebab kekerasan bertentangan dengan penyelesaian secara damai dan sikap mampu mengekang diri , sebagai salah satu nilai dalam demokrasi.

### 2.1.3. Proses Demokrasi menuju Masyarakat Madani

Sejalan dengan dinamika perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ditandai dengan semakin terbukanya persaingan antar bangsa, Indonesia memasuki era reformasi di berbagai bidang kehidupan menuju masyarakat yang lebih demokratis.

Bagi bangsa Indonesia, pemerintahan yang demokratis sudah menjadi cita-cita yang hendak diwujudkan sejak awal kemerdekaan. UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945-pun telah memuat berbagai hak dan kewajiban warga negara serta pemerintah agar terwujud hubungan politik yang demokratis.

Dewasa ini saat gagasan demokrasi semakin mendunia, bangsa Indonesia didorong oleh semangat reformasi berusaha mewujudkan suatu sistem pemerintah yang demokratis pula. Berbagai wacana tentang model demokrasi yang cocok dengan kondisi masyarakat Indonesia yang ber-“Bhineka Tunggal Ika” dengan liku-liku pengalaman historis, serta perkembangan ekonomi, serta interaksinya dengan kecenderungan globalisasi semakin banyak dikembangkan.

Di era reformasi sekarang ini, kita mendambakan suatu masyarakat yang damai, aman, dan sejahtera. Untuk mencapai masyarakat seperti itu, tiap WNI harus berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Oleh karena itu, setiap WNI dituntut memiliki kemampuan, kreativitas dan keterbukaan. Dalam masyarakat seperti ini, setiap warga masyarakat harus terbebas dari rasa takut, bebas berkreasi untuk menyumbangkan kemampuannya kepada negara. Masyarakat seperti inilah yang sering disebut sebagai masyarakat *madani*, suatu masyarakat yang aman, adil, damai dan sejahtera. Jadi *masyarakat yang demokratis* merupakan syarat penting terciptanya **masyarakat madani** (*civil society*).

Menurut **Wildan (2003:250)**, Terminologi *masyarakat madani(ah)* mulai muncul ketika **Anwar Ibrahim** dari Malaysia mencoba menterjemahkan konsep *Civil Society* yang dibangun atas fondasi demokrasi, kebersamaan, dan pembangunan yang berpijak pada kekuatan rakyat dan inspirasi “*Negara Islam Madinah*”. Ide ini mulai berkembang di Indonesia ketika **BJ. Habibie** menjadi Presiden dan menggaungkan cita-cita sebuah Negara dan komunitas masyarakat Madani.

Dalam masyarakat madani, warga negara bekerja sama membangun ikatan sosial, jaringan produktif dan solidaritas kemanusiaan yang bersifat non negara untuk mengejar kebaikan bersama (*public good*). Karenanya, tekanan sentral masyarakat Madani terletak pada independensinya berhadapan dengan kekuasaan negara. Dari sinilah, masyarakat Madani kemudian dipahami sebagai akar gagasan demokrasi.

**Madjid (1999a:4)** menyatakan bahwa, “Masyarakat Madani adalah ‘rumah’ persemaian demokrasi. Jadi, “Masyarakat Madani lebih dari sekedar gerakan pro demokrasi, karena ia juga mengacu pada pembentukan masyarakat berkualitas dan **bertamaddun** (*civility*)”. Selanjutnya, **Madjid (1999b)** juga menyatakan, bahwa proses demokrasi yang dikaitkan dengan konsep masyarakat Madani menuntut penghayatan yang utuh dan pengalaman yang tulus serta dukungan prasarana sosial budaya.

Sementara itu, menurut **Tilaar (1998)**, masyarakat Madani adalah masyarakat yang saling menghargai satu dengan yang lainnya, yang mengakui hak-hak manusia, yang menghormati prestasi dari para anggota sesuai dengan kemampuan yang dapat ditunjukkan bagi masyarakatnya, serta memegang teguh etika pergaulan.

Dalam konteks Indonesia yang berlandaskan Pancasila, menurut **Sudarsono (1999:2)**, *civil society* atau masyarakat madani Indonesia yang baik secara kualitatif ditandai oleh *...true beliefs in and sacrifice for God, respect of human rights,*

*enforcement of rule of law, extention of participation of citizens in public decision making at various levels, and implementation of new form of civic education to develop smart and good citizens*, yakni keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, jaminan hak asasi manusia, penegakkan prinsip *Rule of Law*, partisipasi yang luas dari warganegara dalam pengambilan keputusan publik di berbagai tingkatan, dan pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan untuk mengembangkan Warga Negara Indonesia yang cerdas dan baik.

Selanjutnya, Hikam dalam **Tilaar (1999:159-160)** menyatakan empat ciri utama masyarakat Madani yakni, “kesukarelaan, keswasembadaan, kemandirian tinggi terhadap negara, dan keterkaitan kepada nilai-nilai hukum yang disepakati bersama”.

Inventarisasi masalah demi terwujudnya masyarakat Madani menurut pendapat **Wildan (2003:257)** terletak pada beberapa masalah sebagai berikut :

- 1) Keadaan lahir umat manusia (bangsa Indonesia) hanya bisa diubah dan diperbaiki dengan memperbaiki dan mengubah keadaan batinnya terlebih dahulu;
- 2) Suatu masyarakat hanyalah bisa diubah dan diperbaiki dengan memperbaiki dan mengubah anggota masyarakat itu sendiri
- 3) Membina kemakmuran hidup, membangun keadilan sosial dan meratakan kesejahteraan masyarakat haruslah dimulai dari lapisan bawah;
- 4) Membersihkan masyarakat dari korupsi, kolusi dan nepotisme haruslah dimulai pembasmian dari struktur birokrat di tingkat paling atas (pucuk pimpinan nasional) hingga struktur birokrat paling bawah

Adapun faktor-faktor yang memungkinkan terwujudnya masyarakat madani menurut **Wildan (2003:257-258)** adalah :

- 1) Susunan masyarakat yang rela menjadi *makmum*, pengikut yang taat, setia dan tahu posisi dalam menempatkan dirinya dalam barisan umat yang teratur;
- 2) Kecakapan memilih dan mencari *imam* (pemimpin nasional) yang adil; sebagai tempat menyuarakan dan mempercayakan aspirasi rakyat;
- 3) Kecakapan memilih dan mencari wakil-wakil rakyat yang bisa dipercaya mewakili suara rakyat; bukan wakil rakyat yang duduk untuk dan atas nama kepentingan pribadi dan golongan;
- 4) Kemampuan dari figur pimpinan nasional untuk memberikan pimpinan dan bimbingan kepada rakyatnya dengan memberiteladan yang baik sesuai dengan tuntutan rakyat;
- 5) Kerelaan dan kesediaan, ketaatan dan kepatuhan dari segenap potensi dan komponen bangsa untuk menjalankan perintah dan instruksi dari pemimpinnya

Demi terwujudnya cita-cita masyarakat Madani tersebut di atas, diperlukan manusia yang menghargai perbedaan dan dapat hidup bersama dalam suatu perbedaan dan dapat hidup bersama dalam suatu perbedaan (*unity in diversity*), yaitu warga negara yang dapat hidup dan menghargai perbedaan budaya, agama dan etnis. Warga negara seperti ini, adalah Warga Negara Indonesia yang dapat hidup di segala ragam budaya atau yang dimaksud oleh **Mulyana dan Rakhmat (2000)** sebagai “Manusia Antarbudaya”.

Jadi, dalam masyarakat demokratis yang penting adalah tegaknya supremasi hukum atau *Rule of Law*. Untuk menegakkan supremasi hukum dalam masyarakat demokratis, perlu adanya pendidikan demokrasi. Di tengah meredupnya semangat kebangsaan dan rasa cinta tanah air (nasionalisme) serta jiwa patriotisme terutama di kalangan generasi muda termasuk mahasiswa di dalamnya, Pendidikan

Kewarganegaraan dianggap sebagai sarana pendidikan demokrasi yang sangat strategis di Indonesia, terutama di kalangan generasi muda (mahasiswa) menuju WNI yang Nasionalis dan Patriotis.

Hal ini sesuai dengan karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan yang dikemukakan oleh **Mansoer (2004)**, bahwa Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi sebagai salah satu Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian, diharapkan dapat memegang peran untuk “mengembangkan potensi mahasiswa Warga Negara Indonesia, berkepribadian mantap serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.

Melalui pengasuhan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi (berdasarkan paradigma Pendidikan Tinggi Nasional 2003-2010) yang substansi kajian dan materi instruksionalnya menunjang dan relevan dengan pembangunan masyarakat demokratis – berkeadaban, diharapkan mahasiswa akan tumbuh menjadi ilmuwan/profesional, berdaya saing secara internasional, Warga Negara Indonesia yang memiliki semangat kebangsaan dan cinta tanah air (nasionalisme) serta berjiwa patriotisme.

#### **2.1.4. Nasionalisme dan Patriotisme**

##### **2.1.4.1. Pengertian Nasionalisme**

Dalam perkembangan peradaban manusia interaksi sesama manusia berubah menjadi bentuk yang lebih kompleks dan rumit dimulai dari tumbuhnya kesadaran untuk menentukan nasib sendiri di kalangan bangsa-bangsa yang tertindas kolonialisme dunia, seperti Indonesia salah satunya hingga melahirkan semangat untuk mandiri dan bebas menentukan masa depannya sendiri.

Dalam situasi perjuangan merebut kemerdekaan dibutuhkan suatu konsep sebagai dasar pembenaran nasional dari tuntutan terhadap penentuan nasib sendiri yang dapat mengikat keikutsertaan semua orang atas nama sebuah bangsa. Dasar pembenaran tersebut, selanjutnya mengkrystal dalam konsep paham ideologi kebangsaan yang biasa disebut dengan nasionalisme. Dari sanalah kemudian lahir konsep-konsep turunannya seperti bangsa, (*nation*), negara (*state*) dan gabungan keduanya menjadi konsep negara bangsa (*nation state*) sebagai komponen-komponen yang membentuk identitas nasional atau kebangsaan.

Nasionalisme berasal dari kata “nasional” (*national* dalam bahasa Belanda dan *nation* dalam bahasa Inggris). Nasionalisme diartikan sebagai paham atau ajaran yang mencintai bangsa dan negara sendiri atau kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas kemakmuran dan kekuatan bangsa.

Nasionalisme dapat dikatakan sebagai sebuah situasi kejiwaan dimana kesetiaan seseorang secara total diabdikan langsung kepada negara bangsa atas nama sebuah bangsa (**TIM ICCE UIN JAKARTA, 2005**). Munculnya nasionalisme terbukti sangat efektif sebagai alat perjuangan bersama merebut kemerdekaan dari cengkeraman kolonial. Semangat nasionalisme dihadapkan secara efektif oleh para penganutnya dan dipakai sebagai metode perlawanan dan alat identifikasi untuk mengetahui siapa lawan dan kawan.

Menurut **Hans Kohn** dalam **Mertodipuro (1984:11)**, nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan pada negara kebangsaan. Perasaan yang sangat mendalam akan suatu ikatan yang erat dengan tumpah darahnya.



Selanjutnya **Hans Kohn** dalam **Notosusanto (1985:83-84)** juga menyatakan, bahwa Nasionalisme adalah suatu tata pikir dan tata rasa yang meresapi mayoritas terbesar suatu rakyat dan menganggap dirinya meresapi semua anggota rakyat itu. Nasionalisme mengakui negara nasional sebagai bentuk ideal organisasi politik dan menganggap nasionalisme sebagai sumber dari segala tenaga budaya yang kreatif serta kesentosaan ekonomi, karena itu kesetiaan tertinggi manusia harus ditunjukkan kepada nasionalitasnya karena hidupnya itu sendiri disangka berakar didalamnya dan dimungkinkan oleh kesejahteraannya.

Sementara itu **Soekarno (1965:3)** menyebutkan bahwa nasionalisme itu adalah suatu itikad, suatu keinsafan rakyat bahwa rakyat itu adalah suatu golongan, satu bangsa.

Menurut sifatnya, Nasionalisme terbagi atas dua macam yaitu :

1) *arti sempit*, yaitu perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsa yang berlebihan dan memandang rendah bangsa lain (sering disamakan dengan *jingoisme* atau *chauvisime*)

Contoh : Bangsa Jerman di masa Hitler (Tahun 1933-1945) yang menyatakan bah-

“*Deutschland Uber Alles in derwetf*” (Jerman di atas segala-galanya).

2) *arti luas*, yaitu perasaan cinta atau bangga terhadap tanah air dan bangsa yang tinggi, tetapi tidak memandang rendah bangsa lain

Contoh : bangsa Indonesia

#### **2.1.4.2. Pengertian Patriotisme**

Patriotisme berasal dari kata “patriot” yang berarti pecinta atau pembela tanah air atau seorang pejuang sejati. Patriotisme juga dapat diartikan sebagai pecinta tanah air, pejuang bangsa.

Jadi patriotisme berarti paham tentang semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang sudi berkorban segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya.

Konsep patriotisme seringkali disejajarkan dengan konsep nasionalisme, karena keduanya mempunyai fokus perhatian yang sama yaitu cinta tanah air dan bangsa. Istilah patriotisme sendiri menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia** adalah, semangat, cinta tanah air, sikap seseorang yang sudi mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya. Sikap rela berkorban demi nusa dan bangsa seperti ini, bisa kita sebut sebagai semangat kepahlawanan. Hal ini mengacu pada sikap yang sudah diperlihatkan oleh para pahlawan bangsa yang rela mengorbankan harta, benda, jiwa dan raga dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah.

Menurut Bung Karno, patriot bangsa diidentikkan dengan pendekar atau kampiun bangsa yang didalamnya terdapat Tri Sakti, yaitu :

- 1) berdaulat di bidang politik
- 2) berdikari di bidang ekonomi
- 3) berkepribadian budaya Indonesia

Patriotisme menyangkut pula cinta kepada harga diri manusia yang hidup dari, dan sekaligusmenghidupi tanah airnya sebagai lingkungan dan habitatnya yang konkrit. Jadi, pada intinya patriotisme mengajarkan agar tiap orang rela berkorban segala-galanya demi kejayaan dan kemakmuran tanah airnya.

Nasionalisme dan patriotisme mempunyai hubungan yang erat, bahkan tidak dapat dipisahkan. Patriotisme mengajarkan pada kita untuk selalu mencintai tanah air sebagai tempat berpijak, tempat hidup, dan mencari penghidupan, sedangkan

nasionalisme mengajarkan kepada kita untuk mencintai bangsa dan negara dengan segala apa yang dimilikinya.

Dengan kedua sifat ini akan melahirkan kekuatan atau daya juang yang tangguh untuk mengawal dan menjaga keutuhan, keselamatan, dan kelestarian hidup bangsa dan negara sampai kapanpun

## **2.2. Temuan Hasil Penelitian yang Relevan**

Berikut ini akan dikemukakan salah satu hasil sebuah penelitian yang dianggap relevan dengan kegiatan penelitian yang sedang dilakukan oleh Peneliti. Penelitian itu dilakukan oleh Drs.H. Mupid Hidayat, MA, dkk. Pada tahun 2007 lalu, dengan judul, “Pengembangan Pendekatan Pembelajaran Portofolio pada Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Analitis Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia”, dimana salah satu hasil penelitiannya dianggap relevan dengan kegiatan penelitian yang tengah Peneliti lakukan yaitu sebagai berikut, “Ada perbedaan cara berpikir kritis mahasiswa antara sebelum dan sesudah penerapan model pembelajaran Portofolio pada Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.

Dengan demikian, pendekatan pembelajaran Portofolio efektif untuk mengembangkan cara berpikir kritis-analitis dalam mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.

Hubungan hasil penelitian ini dengan kegiatan penelitian yang sedang dilakukan adalah, bahwa tumbuhnya cara berpikir kritis-analitis dalam Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan melalui pendekatan pembelajaran Portofolio, diharapkan dapat membingkai kepribadian mahasiswa untuk lebih mampu memaknai sejarah perjuangan bangsa dan karakteristik identitas nasional Indonesia, serta

berbagai fenomena yang terjadi di sekitar kehidupannya. Sehingga pada akhirnya, mampu membangkitkan jiwa Nasionalis dan Patriotis dalam diri mahasiswa.

### **2.3. Kerangka Berpikir**

Penelitian ini membahas sejauhmana peran Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sarana pendidikan demokrasi dalam membangkitkan jiwa nasionalis dan patriotis mahasiswa.

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang santun dalam pergaulan antar bangsa. Bangsa yang santun merupakan salah satu ciri identitas Indonesia. Kesantunan berupa menjadi manusia yang religius, adil dan beradab, bersatu, demokratis, untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh bangsa. Paradigma ini tidak tumbuh dengan sendirinya pada setiap pribadi bangsa, namun harus diajarkan kepada generasi penerus bangsa. Salah satu bentuknya yaitu dengan membangun karakter bangsa atau *nation character building*, agar tegak dan tegas menghadapi pergolakan dunia, lebih-lebih pada era globalisasi ini, yang ditandai dengan kemajuan transportasi dan telekomunikasi serta semangat perdagangan bebas, yang mendorong orang berkeinginan menjadi warga negara dunia. Negara maju dan kaya mencita-citakan dunia tanpa batas. Dunia tanpa batas akan merugikan negara yang sedang berkembang apabila bangsa itu tidak memiliki karakter nasional yang kuat disertai intelektual yang tinggi. Tidaklah mengherankan bahwa akan menjadi konflik baik antar negara maupun intern negara nasional karena terpicu persepsi perbedaan nilai-nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Krisis moneter yang dialami bangsa Indonesia pada pertengahan tahun 1997 yang meluas pada krisis politik dan budaya, menyentuh pada segenap sendi kehidupan bangsa. Masyarakat kita cenderung berpikir dan bertindak cepat atas dasar intuisi

tanpa mempertimbangkan akibatnya. Ini juga merupakan sisi lain dari kebangkitan demokrasi. Sedangkan di awal abad XXI kita harus siap menghadapi persaingan global terutama di bidang ekonomi. Karenanya, persiapan sumber daya manusia di pentas global menjadi prioritas yang tak tertunda lagi.

Oleh karenanya, berkenaan dengan hal itu maka Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia mengamanatkan “Visi Indonesia 2020 yang tertuang dalam TAP MPR No. VII/MPR/2001, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang religius, manusia, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara (DIKTI, 2008)

Indikator keberhasilan pelaksanaan TAP MPR No. VII/MPR/2001 tersebut adalah sebagai berikut : (1) Penghormatan terhadap martabat kemanusiaan; (2) Meningkatnya semangat persatuan bangsa, toleransi, kepedulian, dan tanggung jawab sosial; (3) Berkembangnya budaya dan perilaku sportif serta menghargai perbedaan dalam kemajemukan; (4) Menguatnya partisipasi politik sebagai perwujudan kedaulatan rakyat; dan kontrol sosial masyarakat; (5) Berkembangnya Ormas dan Orpol yang bersifat terbuka; (6) Meningkatnya kualitas SDM sehingga mampu bekerjasama dan bersaing di era global; (7) Memiliki kemampuan dan ketangguhan dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah-tengah pergaulan antar bangsa, agar sejajar dengan bangsa lain; (8) Terwujudnya penyelenggaraan negara yang profesional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pendidikan Kewarganegaraan dilakukan dan dikembangkan di seluruh dunia dengan berbagai macam istilah, seperti *civic education*, *citizenship education*, dan bahkan ada yang menyebutnya sebagai *democracy education*.

Menurut **Mansoer (2005)**, mata kuliah ini memiliki peran yang strategis dalam mempersiapkan warganegara yang cerdas, bertanggung jawab dan berkeadaban. Berdasarkan rumusan "*Civic International*" (1995), disepakati bahwa pendidikan demokrasi penting untuk pertumbuhan *civic culture*, untuk keberhasilan pengembangan dan pemeliharaan pemerintahan demokrasi.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 43/DIKTI/KEP/2006, tanggal 2 Juni 2006 tentang "Rambu-rambu pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan tinggi", dinyatakan bahwa Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi terdiri atas Mata Kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia. Dengan demikian *Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan* merupakan bagian dari Kelompok Mata Kuliah pengembangan Kepribadian, yang dengan ketentuan tersebut di atas wajib diberikan di semua Fakultas dan Jurusan di seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia (**Kaelan, 2007:1**)

Secara ideal, Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi memegang peran penting untuk mengembangkan potensi mahasiswa sebagai Warga Negara Indonesia yang berkepribadian mantap serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Adapun aktualisasi dari Pendidikan Kewarganegaraan tersebut adalah melahirkan mahasiswa sebagai ilmuwan profesional sekaligus Warga Negara Indonesia yang memiliki jiwa Nasionalis (rasa cinta tanah air) dan Patriotis (sikap kepahlawanan) yang tinggi.

Di tengah meredupnya semangat kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme terutama di kalangan generasi muda termasuk mahasiswa di dalamnya dewasa ini,

Pendidikan Kewarganegaraan dianggap sebagai *sarana pendidikan demokrasi* yang sangat strategis untuk membangkitkan jiwa nasionalis dan patriotis di kalangan generasi muda (mahasiswa) di Indonesia.

**Winataputra (2006:12)** mengartikan pendidikan demokrasi sebagai upaya sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warganegaranya agar memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan konsep, prinsip, dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya dalam masyarakat.

Demokrasi memang tidak diwariskan, tetapi ditangkap dan dicerna melalui proses belajar. Oleh karena itu, untuk memahaminya diperlukan suatu proses pendidikan demokrasi.

Pernyataan yang mendukung hal tersebut di atas adalah kesepakatan *Civitas International* di tahun 1995, bahwa pendidikan demokrasi penting bagi pertumbuhan *civic culture* untuk keberhasilan pengembangan dan pemeliharaan pemerintahan demokrasi (**Azra, 2002**). Sejalan dengan hal tersebut di atas, pasal 3 *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003* tentang *Sistem Pendidikan Nasional* menyatakan, bahwa *Tujuan Pendidikan Nasional adalah*, "Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".

Hal ini sesuai dengan karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan yang dikemukakan oleh **Mansoer (2004)**, bahwa Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi sebagai salah satu Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian, diharapkan dapat memegang peran untuk "mengembangkan potensi mahasiswa

Warga Negara Indonesia, berkepribadian mantap serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.

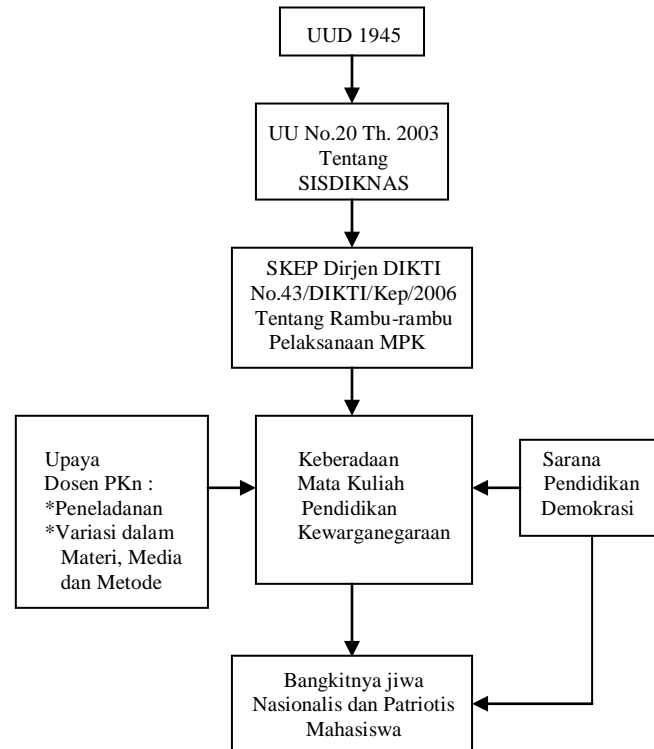
Upaya-upaya para Dosen Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dalam mencoba mewujudkan hal inipun tidak kalah pentingnya. Diantaranya melalui peneladanan diri, variasi penyajian materi (yang dihubungkan dengan kejadian nyata di masyarakat), serta penggunaan metode dan media yang tepat di perkuliahan

Melalui pengasuhan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi (berdasarkan paradigma Pendidikan Tinggi Nasional 2003-2010) yang substansi kajian dan materi instruksionalnya menunjang dan relevan dengan pembangunan masyarakat demokratis – berkeadaban, diharapkan mahasiswa akan tumbuh menjadi ilmuwan/profesional, berdaya saing secara internasional, Warga Negara Indonesia yang memiliki semangat kebangsaan dan cinta tanah air (nasionalisme) serta berjiwa patriotisme.



Kerangka berpikir di atas dapat digambarkan sebagai berikut :

**Peran Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Sarana Pendidikan Demokrasi dalam Membangkitkan Jiwa Nasionalis dan Patriotis Mahasiswa**



**Gambar 1-1**

**Skema Kerangka Berpikir Peran Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Sarana Pendidikan Demokrasi dalam Membangkitkan Jiwa Nasionalis dan Patriotis Mahasiswa**

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Metode Penelitian**

Penelitian ini dikelompokkan dalam penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Disebut penelitian deskriptif karena penelitian ini akan mengungkapkan secara rinci dan sistematis bagaimana peran Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sarana pendidikan demokrasi dalam membangkitkan jiwa Nasionalis dan Patriotis mahasiswa.

Metode deskriptif menurut **Nasir (1985:84)** merupakan metode pencapaian fakta dengan interpretasi yang tepat. Adapun tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan dan memahami pola perilaku suatu masyarakat sebagaimana adanya dalam konteks keutuhan atau suatu kesatuan yang bulat (**Martodirdjo, 1991:74**).

Sebagai penelitian deskriptif, pelaksanaan penelitian tidak terbatas pada pengumpulan data semata-mata, tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi dari data, informasi dan fakta. Analisis dan interpretasi ini merupakan penuturan (uraian) melalui pengklarifikasin, perbandingan-perbandingan dan sebagainya dalam upaya menarik kesimpulan-kesimpulan (**Rusidi, 1993:4-5**)

Selanjutnya, untuk dapat mencapai pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang sedang diteliti tersebut di atas, lebih baik menggunakan pendekatan kualitatif.

Penelitian dengan pendekatan kualitatif pada dasarnya merupakan proses penyelidikan yang menganalisis suatu fenomena sosial dengan cara membandingkan, mereplikasikan, mengkatagorikan, mengklasifikasikan, menganalogikan dan melaksanakan verifikasi data. Seluruh kegiatan ini pada dasarnya bertujuan untuk

menemukan keseragaman pola dan sifat umum dunia sosial yang diteliti oleh peneliti kualitatif (Miles dan Huberman, 1992:47; alih bahasa T.R. Rohidi).

Penelitian kualitatif pada hakekatnya mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya (Nasution, 1992:5)

### 3.2. Subjek dan Objek

Penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Selain itu juga bahwa metode penelitian yang sifatnya kualitatif tidak menggunakan sampling random atau acakan dan tidak menggunakan populasi dan sampel yang banyak. Sampelnya biasanya sedikit dan dipilih menurut tujuan (*purpose*) penelitian (Nasution:1992:11).

Satuan analisis dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Satuan analisis sangat perlu dipahami dalam hubungannya dengan tatanan sosial, yaitu sesuatu yang diamati dalam penelitian dan yang memainkan suatu bagian penting dalam penjelasan tatanan sosial (Garna, 1990:27).

Agar penelitian ini dapat dilakukan secara mendalam, maka subjek yang diteliti jumlahnya dibatasi sebanyak 10 orang berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- 1) responden adalah mahasiswa yang berasal dari salah satu Jurusan/Program Studi sebuah Fakultas di Universitas Pendidikan Indonesia
- 2) sudah mengontrak Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan pada Tahun Ajaran 2006/2007 atau Tahun Ajaran 2007/2008 (mengingat Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan paradigma baru berdasarkan SK DIRJEN DIKTI No.43/DIKTI/KEP/2006, baru mulai diberikan di Universitas Pendidikan Indonesia pada

Semester Ganjil Tahun Ajaran 2006/2007).

Sebagai pelengkap informasi, peneliti akan memanfaatkan beberapa informan yang dipandang dapat memberikan informasi penting atau informasi tambahan tentang responden yang diteliti. Informan dalam penelitian ini sangat penting artinya karena ingin menghasilkan informasi yang sifatnya melembaga.

Menggunakan informan dengan sendirinya kita berhubungan dengan pihak ketiga. Dengan kata lain kita menginginkan informasi mengenai pengetahuan yang dimiliki informan (**Vredenberg, 1978:75**). Dengan demikian dituntut kejelian untuk memilih informan yang betul-betul memiliki dan menguasai pengetahuan yang diharapkan.

Adapun yang menjadi *informan pokok* dalam penelitian ini adalah para Dosen Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dari diri mereka diharapkan dapat diperoleh informasi mendalam tentang peran Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sarana demokrasi dalam membangkitkan jiwa nasionalis dan patriotis mahasiswa.

### **3.3. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan penelitian ini, mulai dari tahap persiapan sampai pelaksanaan penelitian kurang lebih lima bulan, yaitu sejak minggu pertama bulan Juni sampai dengan minggu terakhir bulan Oktober. Adapun lokasi penelitiannya adalah di kampus Universitas pendidikan Indonesia.

### **3.4. Prosedur Penelitian**

Prosedur penelitian dilakukan dalam dua tahap yaitu :

### (1) Tahap Persiapan

Pada tahap ini, peneliti melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Analisa teoritis dengan menggali berbagai sumber referensi yang berhubungan dengan topik penelitian, serta mengidentifikasi kondisi objek di lapangan.
- Menyusun instrumen penelitian yang berupa daftar pertanyaan (pedoman wawancara) untuk para responden
- Memilih dan menentukan sejumlah responden penelitian yang berasal dari berbagai Jurusan/Program Studi dari berbagai Fakultas yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia

### (2) Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini peneliti melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Menghubungi responden terpilih
- Menentukan waktu pelaksanaan wawancara
- Melaksanakan wawancara dalam beberapa tahap, hingga peneliti merasa telah mendapatkan informasi yang cukup guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini
- Melengkapi data hasil wawancara dengan para responden dengan cara mewawancarai sejumlah informan pokok yang berprofesi sebagai Dosen Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Pendidikan Indonesia

Jadi, informasi dari responden diperoleh melalui wawancara mendalam dengan menggunakan daftar pertanyaan (pedoman wawancara) yang telah dipersiapkan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan dipelajari sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi, dengan tujuan untuk mengembangkan pengetahuan yang mendalam mengenai objek penelitian (**Vredenberg, 1978:34**).

Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menggunakan teknik observasi partisipasi dan wawancara mendalam untuk mendapatkan data primer. Ini berarti, data yang diperoleh bersifat personal yang memungkinkan untuk ditemukannya konsep-konsep maupun teori-teori yang bersifat substantif. Pendekatan hipotesis kerja dalam pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk mengarahkan penelitian dan bukan untuk diuji. Oleh karena itu, hipotesis akan diperbaiki dan disesuaikan dengan data lapangan.

### **3.5. Instrumen Penelitian**

#### **PEDOMAN WAWANCARA**

##### **PERAN MATA KULIAH PKN SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN DEMOKRASI DALAM MEMBANGKITKAN JIWA NASIONALIS DAN PATRIOTIS MAHASISWA (Studi pada Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Bandung)**

#### **A. Untuk Mahasiswa :**

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan melemahnya jiwa nasionalis dan patriotis dalam diri mahasiswa ?
2. Seberapa besar andil mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sarana pendidikan demokrasi dalam membangkitkan jiwa nasionalis dan patriotis mahasiswa ?

#### **B. Untuk Dosen :**

Upaya apa yang dilakukan oleh dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan untuk menjadikan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu sarana pendidikan demokrasi dalam membangkitkan jiwa nasionalis dan patriotis mahasiswa (dari segi materi, metoda dan media) ?

### 3.6. Analisis Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi *data primer* dan *data sekunder*. Kegiatan pertama yang akan dilakukan adalah mengumpulkan data sekunder mengenai daerah penelitian. Data-data sekunder yang dikumpulkan adalah gambaran umum keberadaan Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum Universitas Pendidikan Indonesia, Sejarah Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, Sejarah keberadaan Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Pendidikan Indonesia.

*Wawancara mendalam* juga dilakukan pada para dosen Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang dianggap mampu memberikan informasi yang relevan dengan penelitian ini. Data Primer diperoleh dari proses wawancara terhadap sejumlah mahasiswa dari berbagai Jurusan/Program Studi dari berbagai Fakultas yang ada di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia untuk menggali data-data yang terkandung dalam setiap pertanyaan penelitian dengan menggunakan daftar pertanyaan terstruktur yang telah dipersiapkan sebelumnya. Selanjutnya diadakan observasi secara langsung yang dilakukan untuk mengetahui lebih jauh peran Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sarana pendidikan demokrasi dalam membangkitkan jiwa Nasionalis dan Patriotis di kalangan mahasiswa. Dengan memadukan data hasil wawancara dengan hasil observasi maka akan terkumpul informasi yang lebih akurat. Selain itu, penambahan hasil kajian kepustakaan diharapkan akan melengkapi informasi yang akan menghasilkan suatu informasi yang bersifat holistik

## BAB IV

.....

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan dikemukakan hasil-hasil kegiatan penelitian yang meliputi data primer berdasarkan wawancara mendalam dengan para responden dan sejumlah informan pokok, dan data sekunder mengenai keberadaan mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di lapangan, beserta pembahasannya.

### **4.1. Hasil Penelitian**

#### **4.1.1. Gambaran Umum Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum Universitas Pendidikan Indonesia**

Keputusan Senat Akademik Universitas pendidikan Indonesia Nomor : 171/Senat Akd./UPI.TU/V/2006 tentang, ” KETENTUAN POKOK PENGEMBANGAN KURIKULUM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA”, pasal 12 menyatakan, bahwa Mata Kuliah Umum (MKU) dengan jumlah sks sebanyak 14 sks, dan terdiri atas :

- |  |       |
|--|-------|
| 1) Pendidikan Agama .....                                  | 2 sks |
| 2) Pendidikan Kewarganegaraan .....                        | 2 sks |
| 3) Pendidikan Bahasa Indonesia .....                       | 2 sks |
| 4) Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya dan Teknologi ..... | 2 sks |
| 5) Seminar Pendidikan Agama .....                          | 2 sks |
| 6) Pendidikan Jasmani dan Olah Raga .....                  | 2 sks |
| 7) Kuliah Kerja Nyata .....                                | 2 sks |

Selanjutnya dalam pasal 9 ayat (1) peraturan tersebut dinyatakan bahwa, ” Mata Kuliah Umum (MKU) adalah kelompok mata kuliah yang ditujukan untuk



mengembangkan aspek kepribadian mahasiswa sebagai individu dan warga masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapatlah dinyatakan bahwa Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bagian dari Mata Kuliah Umum yang wajib diberikan kepada seluruh mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia dengan bobot 2 sks.

#### **4.1.2. Sejarah Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi**

*Pendidikan Kewarganegaraan* sebagai bagian dari Mata Kuliah dasar Umum atau mata Kuliah Umum (sekarang sebagai bagian dari Mata Kuliah pengembangan Kepribadian) di Perguruan Tinggi Indonesia, secara formal untuk pertama kalinya mulai diajarkan pada Tahun Ajaran 1973/1974, sebagai bagian dari kurikulum Pendidikan Nasional, dengan tujuan untuk menumbuhkan kecintaan kepada tanah air dalam bentuk Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PBBN), yang dilaksanakan dalam dua tahap yaitu, *tahap awal* diberikan di jenjang persekolahan (mulai dari Sekolah dasar sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) dalam bentuk kegiatan *Kepramukaan*; sedangkan *tahap lanjut*-nya diberikan di *Perguruan Tinggi* dalam bentuk *Mata Kuliah Pendidikan Kewiraan* (Ganeswara dkk, 2008:10).

Adapun Tujuan Pendidikan Kewiraan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Pertahanan dan Keamanan pada tahun 1973 yaitu, agar mahasiswa : (1) cinta tanah air; (2) sadar berbangsa dan bernegara; (3) yakin akan ideologi Pancasila, serta (4) rela berkorban kepada bangsa dan negara.

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang, "Pokok-pokok Penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Negara" dan Undang-undang

Nomor 2 tahun 1989 tentang, "Sistem Pendidikan Nasional" ditentukan bahwa, "Pendidikan Kewiraan adalah bagian dari Pendidikan Kewarganegaraan dan wajib diikuti oleh semua mahasiswa Warga Negara Indonesia". Namun isinya masih sama dengan Pendidikan kewiraan yang lebih cenderung bersifat doktrin.

Seiring dengan perubahan kehidupan politik dan kenegaraan di era reformasi maka Mata Kuliah *Pendidikan Kewiraan* berganti nama menjadi *Pendidikan Kewarganegaraan*, berdasarkan Surat Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 267/DIKTI/Kep/2000.

Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 38/DIKTI/Kep/2002 tentang, "Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah : (1) mengantarkan peserta didik memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap dan perilaku untuk cinta tanah air Indonesia; (2) menumbuhkembangkan wawasan kebangsaan, kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga terbentuk daya tanggal sebagai ketahanan nasional; (3) menumbuhkembangkan peserta didik untuk mempunyai pola sikap dan pola pikir yang komprehensif, integral pada aspek kehidupan nasional.

Dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang, "Sistem pendidikan Nasional", Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang : (1) memiliki rasa kebangsaan dan (2) cinta tanah air

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang "Sistem Pendidikan Nasional", dalam pasal 37 ayat (2)-nya menetapkan bahwa kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat : a) Pendidikan Agama; b) Pendidikan Kewarganegaraan; c) Bahasa. Dengan demikian Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan merupakan

bagian dari Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) yang wajib diikuti semua mahasiswa Indonesia. Dengan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut, secara formal Mata Kuliah pendidikan Pancasila tidak diwajibkan lagi. Begitu pula Pendidikan Pendahuluan Bela Negara pun tidak disinggung lagi. Namun berbagai pandangan yang berkembang cenderung memasukkan unsur-unsur fundamental dalam Pendidikan Pancasila, dan topik-topik yang relevan dalam pendidikan Pendahuluan Bela Negara yang mewarnai Ke-Indonesiaan, *Citizenship Education* Indonesia mutlak harus dilanjutkan.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Dirjen DIKTI No. 43/DIKTI/Kep/2006 tentang "Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan (MPK) di Perguruan Tinggi", dalam ayat (6)-nya dinyatakan, bahwa Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian meliputi : Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.

Maka, dengan keluarnya Surat Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang, "Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) di Perguruan Tinggi" tersebut, mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian wajib dimasukkan ke dalam kurikulum inti setiap Program Studi. Dengan beban Studi untuk masing-masing Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian tersebut adalah 3 sks.

#### **4.1.3. Sejarah Keberadaan Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Pendidikan Indonesia**

Awalnya, Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Pendidikan Indonesia (yang saat itu masih bernama IKIP Bandung) bernama "Pendidikan Kewiraan".

.....

Mata Kuliah Pendidikan Kewiraan ini, bersama-sama dengan sejumlah Mata Kuliah lain seperti Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya dan teknologi (yang saat itu masih terpisah-pisah sebagai Mata Kuliah Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar dan Ilmu Alamiah Dasar), Seminar Pendidikan Agama, Pendidikan Jasmani dan Rohani serta Kuliah Kerja Nyata, merupakan Mata Kuliah yang berada di bawah Jurusan Mata Kuliah dasar Umum (MKDU).

Pada saat Surat keputusan Dirjen DIKTI Nomor 267/DIKTI/Kep/2000 yang berisi tentang perubahan nama Mata Kuliah Pendidikan Kewiraan menjadi Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan diberlakukan, maka di Universitas Pendidikan Indonesiapun Mata Kuliah Pendidikan Kewiraan berganti nama menjadi Pendidikan Kewarganegaran, dengan materi yang tetap sama dengan materi Pendidikan Kewiraan.

Selanjutnya, berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang "Sistem Pendidikan Nasional", dalam pasal 37 ayat (2)-nya dinyatakan bahwa kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat : a) Pendidikan Agama; b) Pendidikan Kewarganegaraan,; c) Bahasa. Dengan demikian Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bagian dari Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) yang wajib diikuti semua mahasiswa Indonesia, termasuk Universitas Pendidikan Indonesia.

Akhirnya, berdasarkan Surat Keputusan Dirjen DIKTI No. 43/DIKTI/Kep/2006 tentang "Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan (MPK) di Perguruan Tinggi", dalam ayat (6)-nya dinyatakan, bahwa Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian meliputi : Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian

ini wajib dimasukkan ke dalam kurikulum inti setiap Program Studi. Beban Studi untuk masing-masing Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian tersebut adalah 3 sks

Hanya sayangnya, hingga menjelang berakhirnya Semester Ganjil Tahun Ajaran 2008/2009 ini, di Universitas Pendidikan Indonesia kebijakan Otonomi yang menyangkut beban studi 3 sks untuk masing-masing Mata Kuliah Yang termasuk Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian tersebut di atas (tak terkecuali Pendidikan Kewarganegaraan) belum bisa dilaksanakan. Alhasil, sejak Semester Ganjil tahun Ajaran 2006/2007, walaupun dalam hal pemberlakuan Mata kuliah yang termasuk Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian berdasarkan Surat Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tersebut sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya, hanya dalam beban sks-nya tetap dalam bobot 2 sks.

Tetapi walaupun demikian, para Dosen Mata Kuliah Dasar Umum Universitas pendidikan Indonesia, sejak awal tetap memberlakukan Silabi dan Satuan Acara Pelajaran (SAP) sesuai rujukan DIKTI (dengan bobot materi untuk 3 sks). Hal ini dilatarbelakangi oleh pemikiran para Dosen Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Pendidikan Indonesia yang tidak ingin para mahasiswanya ketinggalan jaman, sebab materi perkuliahan Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan Surat Keputusan Dijen DIKTI No. 43/DIKTI/Kep/2006 ini merupakan *Pendidikan Kewarganegaraan Paradigma Baru* yang berbeda dengan Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Paradigma lama (sebagai pengganti nama Mata Kuliah Pendidikan Kewiraan, dengan isi kurikulum yang lebih mengarah pada ajaran HANKAMNAS). Jadi Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diberlakukan sekarang ini, adalah mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Paradigma baru yang berbasis Pancasila.

.....

Hanya tentu saja, sejumlah kendala harus dihadapi, misalnya dalam keterbatasan waktu (yang harusnya bobotnya 3 sks tapi diberikan dalam bobot 2 sks) tentunya menuntut kejelian dan ketrampilan khusus para Dosen Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia untuk mengemas materi yang seharusnya berbobot 3 sks, tapi harus disampaikan dalam waktu 2 sks.

## **4.2. Pembahasan Penelitian**

Berikut ini akan disajikan pembahasan dari sejumlah data penelitian yang berhasil di dapat berdasarkan wawancara mendalam dengan para responden dan informan pokok. Penyajian pembahasan data hasil wawancara mendalam tersebut akan dilakukan secara berurutan sesuai dengan urutan pertanyaan dalam identifikasi masalah dalam Bab Pendahuluan.

### **4.2.1. Faktor-faktor Penyebab Melemahnya Jiwa Nasionalis dan Patriotis dalam Diri Mahasiswa**

Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden, diperoleh jawaban yang cukup bervariasi tentang faktor-faktor penyebab melemahnya jiwa Nasionalis dan Patriotis dalam diri mahasiswa, namun ternyata setelah diamati lebih jauh, ada sejumlah kesamaan pendapat dalam kerangka berpikir mereka, seperti yang tersaji berikut ini :

*Iq* (salah seorang responden dalam penelitian ini) mengemukakan bahwa melemahnya jiwa nasionalis dan patriotis dalam diri mahasiswa dewasa ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- Sikap hidup generasi muda Indonesia dewasa ini yang cenderung *hedonis* (pemuja

.....

kenikmatan duniawi), akibat meluasnya arus informasi global dari luar yang kurang mampu mereka *filter* (saring) dengan nilai-nilai kepribadian yang dimiliki bangsa Indonesia, sehingga mereka lebih mengagung-agungkan bangsa lain dengan segala produknya.

- Negara kita kurang memiliki figur-figur yang bisa dijadikan panutan oleh generasi muda, sehingga mereka lebih suka menjadikan orang lain (yang berasal dari bangsa lain) sebagai figur panutannya
- Sikap individualisme (mementingkan diri sendiri) yang merajalela, sehingga menghilangkan semangat sebangsa dan setanah air, membuat kita lupa terhadap jasa para pahlawan bangsa di masa lalu, serta semangat persatuan dan kesatuan yang mereka tumbuhkan sebagai modal untuk merebut kemerdekaan
- Dalam kondisi jaman yang semakin berubah, generasi muda banyak yang meniru gaya hidup orang barat (Westernisasi), yang lejas-jelas bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia
- Kurangnya sosialisasi pentingnya jiwa nasionalisme dan patriotisme di kalangan generasi muda

Sementara itu, seorang responden lain *Nw*, menyatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan melemahnya jiwa Nasionalis dan Patriotis di kalangan mahasiswa adalah sebagai berikut :

- Sejarah dianggap masa lalu, sehingga semangat yang dulu dimiliki oleh para pejuang untuk membela bangsa tidak dimiliki oleh generasi muda
- Kurangnya media yang menayangkan berbagai film atau cerita-cerita dokumenter perjuangan para pahlawan bangsa, sebagai cermin semangat Nasionalisme dan Patriotisme di masa lalu

.....

- Kurang terawatnya tempat-tempat wisata yang sesungguhnya merupakan benda-benda peninggalan bersejarah yang seharusnya dapat dijadikan sebuah bukti kejayaan bangsa Indonesia di masa lalu, sehingga kurang dijadikan alternatif kunjungan wisata bagi generasi muda. Padahal dengan melihat langsung berbagai peninggalan sejarah tersebut diharapkan dapat membangkitkan semangat Nasionalisme dan Patriotisme di kalangan mahasiswa
- Kehidupan *individualis* (sikap mementingkan diri sendiri) yang 'dituntut' oleh jaman modern ini, membentuk kepribadian mahasiswa menjadi sosok individu yang tidak peduli terhadap lingkungan di sekitarnya, dan ini merupakan salah satu bukti melemahnya jiwa Nasionalis dan Patriotis mahasiswa, sebab Nasionalisme dan Patriotisme dapat diartikan sebagai kepedulian terhadap sesama anak bangsa

Sementara itu, *Au* berpendapat bahwa melemahnya jiwa Nasionalis dan Patriotis di kalangan mahasiswa disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- *Image* bangsa di mata generasi muda yang kurang membanggakan, yang disebabkan oleh berbagai fenomena negatif yang terjadi di negara kita akhir-akhir ini, sehingga membuat generasi muda kurang percaya diri saat menyatakan "Aku Anak Indonesia".
- Kurangnya pembekalan dan pembinaan tentang jati diri sebagai Warga Negara Indonesia yang ditanamkan oleh orang tua di lingkungan keluarga sejak usia dini, juga didukung oleh keadaan lingkungan di luar rumah yang acuh tak acuh terhadap hal tersebut, sehingga mental anak menjadi "rapuh" dan kurang menyadari perannya sebagai generasi muda, calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang
- Pengaruh budaya luar dan globalisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia, yang membuat generasi muda tidak peduli terhadap nasib bangsa, dan bahkan malah terkesan lebih membanggakan negara lain

.....



- Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang begitu pesat, sehingga mahasiswa terkena sindrom "malas" untuk mengenal jati diri bangsa, sebab yang terpenting bagi mereka adalah hidup dengan kemampuan menyesuaikan diri dengan perkembangan IPTEK.

Tidak jauh dari pendapat yang dikemukakan oleh rekan-rekannya tersebut di atas, *Dp* menyatakan bahwa melemahnya jiwa Nasionalisme dan Patriotisme mahasiswa disebabkan oleh hal-hal berikut ini :

- Era globalisasi, yang berdampak cukup kompleks karena didukung oleh teknologi komunikasi yang canggih. Berbagai informasi dan produk-produk yang berhubungan dengan globalisasi dapat mengubah pola pikir manusia, tak terkecuali mahasiswa. Globalisasipun diduga dapat berpengaruh cukup kuat di bidang kehidupan sosial budaya, ekonomi juga politik. Sehingga orang cenderung hanya berpikir untuk mampu bersaing di era globalisasi dewasa ini, tapi sayangnya dengan mengabaikan berbagai nilai-nilai agama dan kepribadian bangsa yang seharusnya menjadi landasan dari semua perilaku kita
- Munculnya sikap *hedonis* yang menganggap kenikmatan pribadi sebagai suatu nilai hidup tertinggi, yang membuat manusia memaksakan diri mencapai kepuasan pribadi tanpa menghiraukan kepentingan orang lain, dan hal ini jelas berpengaruh juga terhadap ketidakpeduliannya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia
- Kurangnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari

Sementara itu, *Nt* berpendapat, bahwa melemahnya jiwa Nasionalisme dan Patriotisme mahasiswa dilatarbelakangi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

.....

- Kurangnya pengetahuan mahasiswa tentang sejarah nasional bangsa Indonesia, misalnya yang meliputi sejarah perjuangan para pahlawan bangsa dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia
- Masuknya kebudayaan asing ke Indonesia secara pesat (yang tentunya bertentangan dengan jati diri bangsa Indonesia), yang lama kelamaan akumulasi dari nilai atau budaya asing tersebut sedikit banyak telah mengikis kebudayaan asli bangsa Indonesia. Mahasiswa sebagai generasi muda seolah lebih bangga terhadap kebudayaan asing tersebut dan menjadikannya sebagai patokan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, pola hidup *individualistik* (mementingkan kepentingan sendiri) yang telah merajalela di kalangan mahasiswa, hal ini mengakibatkan mereka tidak peduli lagi terhadap berbagai keadaan dan kepentingan masyarakat dan bangsa Indonesia.  
  
Lagu-lagu barat lebih sering dinyanyikan oleh mahasiswa, sementara lagu-lagu wajib nasional bahkan terlupa syairnya
- Kurangnya pembinaan ataupun pendidikan kepada mahasiswa tentang pentingnya jiwa Nasionalisme dan Patriotisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, misalnya Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan hanya diajarkan dalam jangka waktu satu semester saja dengan bobot sks 2 pula.
- Kurangnya peran media dalam membangkitkan jiwa Nasionalisme dan Patriotisme mahasiswa. Acara-acara televisi Indonesia dewasa ini misalnya, lebih didominasi oleh sinetron dan cerita-cerita yang kurang dapat memberikan pesan moral yang baik kepada generasi muda. Jarang sekali ditampilkan sinetron atau cerita yang mengangkat kebudayaan Indonesia, yang pada akhirnya diharapkan akan membangkitkan rasa bangga dan cinta kepada tanah air dan bangsa.

.....

Agak berbeda dengan berbagai pendapat terdahulu, As mengklasifikasikan faktor-faktor penyebab melemahnya jiwa Nasionalisme dan Patriotisme mahasiswa ke dalam dua bagian besar sebagai berikut :

a) Faktor internal, yang meliputi :

- Kekecewaan mahasiswa pada kebijakan pemerintah yang dinilai kurang bijak dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat
- Kekecewaan kepada aparat pemerintah yang kurang *amanah* dalam mengemban tugasnya karena masih diwarnai praktek KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dan birokrasi yang rumit serta kecenderungan ”memperkaya diri sendiri”, sehingga semakin menyengsarakan kehidupan rakyat
- Ketidaktahuan atau bahkan ketidakpedulian mahasiswa terhadap sejarah perjuangan bangsa

b) Faktor eksternal, yang meliputi :

- Pengaruh negatif era globalisasi, sehingga mahasiswa cenderung mengagungkan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, gaya hidup kebarat-baratan, dan melupakan nilai-nilai agama dan kepribadian bangsa
- Lingkungan pers yang sering mengangkat isu aktual baik di bidang kehidupan politik, sosial, budaya ataupun ekonomi di negara kita secara berlebihan , sehingga berimbas juga pada melunturnya jiwa Nasionalisme dan Patriotisme mahasiswa

Berdasarkan berbagai pendapat para responden tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan melemahnya jiwa Nasionalisme dan Patriotisme mahasiswa adalah sebagai berikut :

1) *Faktor Internal* (yang berasal dari dalam diri mereka), terdiri atas :

.....

- a. Ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan mahasiswa terhadap sejarah perjuangan para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia
- b. Kurangnya pemahaman mahasiswa tentang karakteristik identitas nasional bangsa, serta pentingnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
- c. Kurangnya kesadaran mahasiswa tentang pentingnya kepemilikan jiwa Nasionalisme dan Patriotisme
- d. Tumbuhnya sikap hidup individualistik (mementingkan diri sendiri) dalam diri mahasiswa, sehingga mengakibatkan mereka abai terhadap kepentingan orang lain, termasuk juga kepentingan bangsa dan negara
- e. Tumbuhnya sikap hidup *hedonis* (pemuja kenikmatan duniawi) di kalangan mahasiswa, yang mengakibatkan mereka hanya mengejar kesenangan diri tanpa peduli terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di sekitar kehidupan mereka
- f. Kekecewaan dalam diri mahasiswa, akibat berbagai fenomena yang terjadi di negara kita, seperti krisis multi dimensional sejak berakhirnya pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto; masih maraknya praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) serta berbagai tindak kriminal lain yang dilakukan oleh sejumlah oknum pejabat atau wakil rakyat di negara kita; adanya berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai kurang memihak kepada kepentingan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, misalnya keputusan untuk menaikkan harga BBM dan sebagainya

2) *Faktor Eksternal* (yang berasal dari luar diri mereka), terdiri atas :

.....

- a. Pengaruh negatif era globalisasi dan modernisasi, yang cenderung membuat mahasiswa lebih mengagung-agungkan budaya dan produk negara lain, dan cenderung melupakan kebudayaan nasional dan mengabaikan barang-barang produksi dalam negeri sendiri
- b. Tumbuhnya *westernisasi* (gaya hidup kebarat-baratan) di kalangan mahasiswa, sebagai akibat dari pesatnya arus informasi dan globalisasi dan lemahnya kemampuan *filterisasi* (penyaringan) dalam diri mahasiswa
- c. Kurangnya *event-event* yang menampilkan pagelaran seni kebudayaan daerah, yang diharapkan mampu menumbuhkan rasa bangga dalam diri mahasiswa terhadap kekayaan kebudayaan nasional bangsa Indonesia
- d. Kurangnya peneladanan dari orang tua dan guru tentang perwujudan jiwa Nasionalisme dan Patriotisme dalam kehidupan sehari-hari

Nasionalisme merupakan formalisasi ataupun rasionalisasi dari kesadaran nasional. Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang sejak awal anti kolonialisme dan anti imperialisme. Pembentukan Indonesia sebagai *nation* selain faktor kesamaan geografis, bahasa, kohesifitas ekonomi, dan yang paling pokok adalah *make up* psikologi sebagai bangsa terjajah.

Ketika para pemuda Indonesia bertekad untuk berbangsa satu, bertanah air satu dan berbahasa satu, Indonesia, dalam Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 lalu, tidak cukup hanya hasrat untuk bersatu. Kita belajar dari sejarah bahwa telah ada banyak sekali organisasi kepemudaan sebelum peristiwa Sumpah Pemuda, sebut saja Jong Java, Jong Sumatra, Jong Celebes dan sebagainya. Meskipun demikian, *nasionalist passion* yang sifatnya etnis dan kedaerahan ini justru semakin melemah sejalan dengan mengentalnya kesadaran akan keIndonesiaan sebagai sebuah,

”Identitas baru” vis-a vis pengalaman kolektif berada di bawah kekuasaan bangsa penjajah.

Perjuangan organisasi-organisasi seperti Partai Nasional Indonesia di Indonesia dan Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda yang eksplisit memperjuangkan kemerdekaan Indonesia jelas menunjukkan adanya kristalisasi pengalaman keIndonesiaan ini, dengan puncaknya adalah pernyataan tekad satu bangsa, satu tanah air dan satu bahasa Indonesia.

Demikianlah, pengalaman penderitaan dan diskriminasi oleh pemerintah Hindia Belanda terutama sejak selama tahun 1980-1870, telah melahirkan sebuah kesadaran pengalaman bersama sebagai sebuah masyarakat terjajah, kemudian berkembang menjadi sebuah bangsa terjajah. Karena itu, nasionalisme Indonesia adalah sebuah nasionalisme bentukan, sebuah kesadaran akan identitas bangsa sebagai hasil konstruksi karena pengalaman penderitaan dan diskriminasi oleh bangsa kolonial Belanda. Itulah nasionalisme Indonesia, yakni sebuah penegasan akan identitas diri versus kolonialisme-imperialisme.

Kesadaran sebagai bangsa yang adalah hasil konstruksi atau bentukan mengandung kelemahan internal yang serius ketika kolonialisme dan imperialisme tidak lagi menjadi sebuah ancaman. Karena itu, nasionalisme kita akan ikut lenyap jika kita berhenti mengkonstruksi atau membentuknya, tanpa harus menyebutnya sebagai sebuah nasionalisme baru. *Pertama*, beberapa pengalaman kolektif seharusnya menjadi ”roh” baru pembangkit semangat nasionalisme Indonesia. Misalnya keberhasilan para siswa kita dalam Olimpiade Fisika, Kimia, Biologi atau Matematika di tingkat Regional ataupun Internasional; keberhasilan atlet kita di tingkat dunia (Tinju); prestasi pimpinan kita menjadi Menteri Ekonomi di tingkat Asia (Dr. Sri Mulyani Indrawati) dan seterusnya. Sebaliknya, pengalaman dicemooh

sebagai bangsa terkorup, sarang teroris terbesar, seharusnya memicu kita untuk berubah dan tampil sebagai bangsa terpandang.

*Kedua*, Negara Indonesia sangat plural. Identifikasi sebuah kelompok etnis atau agama pada identitas kolektif sebagai bangsa hanya mungkin terjadi kalau negara mengakui, menerima, menghormati, dan menjamin hak hidup mereka. Masyarakat akan merasa lebih aman dan diterima dalam kelompok etnis atau agamanya ketika negara gagal menjamin kebebasan beragama, kebebasan beribadah, dan mendirikan rumah ibadah, persamaan di hadapan hukum, hak mendapatkan pendidikan yang murah dan berkualitas, hak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak dan sebagainya.

Substansi nasionalisme Indonesia mempunyai dua unsur, *pertama* kesadaran mengenai kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari banyak suku, etnik, dan agama. *Kedua*, kesadaran bersama bangsa Indonesia dalam menghapuskan segala bentuk penjajahan dan penindasan dari bumi Indonesia. Semangat dari dua substansi tersebutlah yang kemudian tercermin dalam proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, dan Pembukaan UUD 1945. Dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan RI, dinyatakan dengan jelas, "Atas nama bangsa Indonesia", sedang dalam Pembukaan UUD 1945 secara tegas dikatakan, "Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan".

Proklamasi kebangsaan Indonesia tersebut dalam sejarah perkembangannya telah memberi makna yang sangat signifikan bagi *nation building* dan pemantapan kesadaran nasionalisme Indonesia. Proses perkembangan nasionalisme Indonesia dipelopori oleh Bung Karno (terutama sejak masa mudanya), yang hanya berkeyakinan bahwa dengan ide dan jiwa nasionalismelah sekat-sekat etnik, suku, agama, budaya, dan tanah kelahiran bisa ditembus untuk menggalang persatuan

perjuangan melawan kolonialisme. Suka atau tidak suka harus diakui keberadaan bangsa Indonesia dengan kesadaran nasionalismenya, dan keberadaan negara Indonesia dengan segala atributnya sebagai suatu fakta yang tidak dapat disangkal oleh siapapun juga. Bung Karno juga berpendapat, bahwa nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang berfondasi Pancasila. Artinya nasionalisme tersebut bersenyawa dengan keadilan sosial, yang oleh Bung Karno disebut *socio-nasionalisme*. Nasionalisme yang demikian ini menghendaki penghargaan, penghormatan, toleransi pada bangsa atau suku bangsa lain.

Dewasa ini harus diakui, bahwa kesadaran akan Nasionalisme sedang mengalami berbagai permasalahan berat, yang memerlukan pembenahan serius. Kegagalan pembenahannya dikhawatirkan akan mempunyai dampak buruk terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto selama kurang lebih 32 tahun, diakhiri dengan timbulnya krisis multi dimensional yang luar biasa, kemelaratan dan kesengsaraan rakyat yang tak terhingga. Hal ini yang menjadi salah satu faktor terkikisnya jiwa Nasionalisme di negara kita terutama di kalangan generasi muda (mahasiswa).

Jiwa Nasionalisme Indonesia bisa bangkit lagi, bila sebagian besar rakyat Indonesia masih teguh jiwa Patriotismenya, dan hal ini akan semakin mudah terwujud apabila ditunjang oleh upaya-upaya serius para penyelenggara negara untuk :

- 1) melaksanakan pembangunan ekonomi di semua daerah secara merata dan realisasi Otonomi daerah secara luas
- 2) Penegakkan demokrasi yang tidak anarkhistik, supremasi hukum yang berkeadilan dan demokratik
- 3) Penggalakan kehidupann yang bersuasana toleransi , aman damai dan rukun dalam masyarakat yang multi agama, suku, etnik dan budaya





Kegagalan atas upaya tersebut akan mempercepat berlanjutnya proses penipisan jiwa Nasionalisme Indonesia, yang akan berakibat semaraknya disintegrasi bangsa dan negara Indonesia.

Juwono Sudarsono, dalam Temu dialog pada tanggal 16 Agustus 2008 lalu, menyatakan bahwa pertahanan bukan sekedar alat utama sistem senjata (Alutsista). Sebab pertahanan bukan hanya militer saja, melainkan juga non militer. Pertahanan non militer dalam era nasionalisme baru atau taman sari internasionalisme pertahanan bukan nasionalisme sempit. Nasionalisme Indonesia yang berkembang dalam taman sari Internasionalisme yang dinamakan globalisasi.

Selanjutnya, Juwono juga berkeinginan, agar nilai-nilai, budaya, adat istiadat, lingkaran-lingkaran budaya serta pulau-pulau besar dan kecil di seluruh Indonesia menjadi zamrud khatulistiwa yang akan memberi pancaran tersendiri dalam bingkai politik Indonesia. Kebhinekaan itu merupakan bagian dari bingkai-bingkai NKRI, yang bukan sekedar slogan NKRI melainkan NKRI yang plus keadilan.

Tantangan kita ke depan adalah mengisi kembali rasa kebersamaan yang diciptakan Bung Karno dalam pidato-pidatonya. Sejarah tidak boleh kita lupakan, tapi sejarah jangan menjadi perangkap hanya untuk meninjau masa lampau. Sejarah kita pakai untuk mengisi nilai-nilai kebersamaan, dari satu nasib sepenanggungan, lahirilah satu kepribadian yang sama.

Konsep Nasionalisme, biasa dihubungkan dengan Patriotisme. Patriotisme sering diartikan sebagai sikap yang berani, pantang menyerah, rela berkorban demi bangsa dan negara. Patriotisme berasal dari kata "Patriot" dan "isme", yang berarti sifat kepahlawanan atau jiwa pahlawan atau "heroism" dan *patriotism*, dalam bahasa Inggris. Pengorbahan ini dapat berupa pengorbanan harta, benda maupun, jiwa raga.

.....

Pada umumnya gambaran seseorang yang memiliki jiwa Patriotisme itu adalah orang-orang yang mencintai tanah airnya sampai titik darah penghabisan. Mereka tidak hanya sekedar mencintai keluarga, sanak saudara, tetapi mencintai tanah air setukus-tulusna, artinya mencintai tanah air tidak hanya sekedar mencintai daerah, wilayah, pulau, negara dalam arti geografis, tetapi lebih dari itu adalah mencintai rakyat seluruh negeri. Kebahagiaan seorang patriot adalah kebahagiaan orang yang melihat kedamaian, kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyatnya.

Sebuah pertanyaan kembali muncul, sama halnya dengan Jiwa Nasionalisme, mengapa semangat Patriotisme yang penuh pelayanan keadilan, kesejahteraan dan perdamaian ini juga semakin melemah dalam diri bangsa Indonesia (terutama generasi mudanya) dewasa ini ?

Sejumlah faktor bisa dijadikan sebagai jawabannya. *Pertama*, dominasi militerisme yang terlalu kuat di masa Orde baru. Militerisme di masa Orde baru telah menggeser semangat persatuan dan kesatuan bangsa, telah dipakai untuk membenarkan segala tindakan yang pada dasarnya untuk kepentingan segelintir orang saja. *Kedua*, gelombang dasyat kesadaran akan nilai hakiki kemanusiaan. Globalisasi tidak hanya membawa kepentingan para pemodal Internasional, tetapi secara positif mau tidak mau harus diakui telah menumbuhkan pula kesadaran globalisasi akan nilai-nilai kemanusiaan. *Ketiga*, iklim pendidikan yang cenderung menjunjung tinggi nilai-nilai eksklusif kelompok saja tidak akan menyuburkan tumbuhnya semangat patriotisme sejati di bumi Indonesia.

Jiwa Patriotisme masih diperlukan sampai saat ini. Jika dahulu para pejuang memiliki semangat patriotisme yang diwujudkan dengan perjuangan mereka untuk meraih kemerdekaan Indonesia, maka saat ini di alam kemerdekaan, kita tak akan mungkin memiliki bentuk Patriotisme yang sama dengan mereka. Negara kita sudah

lama merdeka, maka yang dapat kita lakukan adalah mengisi kemerdekaan bangsa ini dengan berbagai perilaku positif untuk membangun bangsa.

Jiwa patriotisme bisa mendasari berbagai aspek kehidupan bangsa ini. Jiwa Patriotisme akan mendasari semangat kerja dengan baik. Sebab dengan jiwa Patriotisme kita bekerja dengan satu tujuan, membangun bangsa.

Dewasa ini, agaknya yang kita perlukan semangat patriotisme kemanusiaan. Semangat patriotisme kemanusiaan ini hanya menjadi monopoli sipil saja, tetapi juga bisa ditumbuhkan dalam diri generasi muda kita. Semangat ini perlu ditandai oleh karakter-karakter luhur seperti keberanian untuk membela tana air dan bangsa semaksimal mungkin, menjunjung nilai keadilan bagi segenap rakyat Indonesia, menjunjung nilai perdamaian serta nilai kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sudah saatnya kita bertekad, jiwa Patriotisme sejati hendaknya mampu menghalau berbagai permasalahan yang melanda negara kita dewasa ini, serta kita jadikan sebagai dasar untuk membangun bangsa di era globalisasi ini.

Memasuki era modernisasi dan globalisasi, merupakan suatu hal yang tidak terelakkan bagi bangsa manapun di dunia, tak terkecuali Indonesia. Setiap masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan sosial dengan kata lain perubahan sosial merupakan gejala yang melekat di setiap kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kehidupan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia. Sebuah masyarakat yang sedang mengalami pembangunan sekaligus di dalamnya juga sedang mengalami proses modernisasi, hal ini sesuai dengan teori perubahan sosial yang bersifat linier

Modernisasi menurut **Koentjaraningrat** dalam **Effendi** dan **Malihah**, (2007:68), adalah merupakan usaha penyesuaian hidup dengan konstelasi dunia sekarang ini. Hal itu berarti bahwa untuk mencapai tingkat modern harus berpedoman kepada dunia sekitar yang mengalami kemajuan. Modernisasi yang telah dilandasi

oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya bersifat fisik material saja, melainkan lebih jauh daripada itu, yaitu dengan dilandasi oleh sikap mental yang mendalam.

Selanjutnya, masih tentang modernisasi, **Schorrl** dalam **Effendi** dan **Malihah (2007:68)** berpendapat bahwa modernisasi adalah proses penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam semua segi kehidupan manusia dengan tingkat yang berbeda-beda tetapi tujuan utamanya untuk mencari taraf hidup yang lebih baik dan nyaman dalam arti yang seluas-luasnya, sepanjang masih dapat diterima oleh masyarakat yang bersangkutan.

Jadi, dapatlah dinyatakan bahwa modernisasi merupakan persoalan-persoalan yang berhubungan erat dengan pembagian kerja, aktivitas untuk mengisi waktu-waktu senggang dan sebagainya. Awal proses modernisasi biasanya berupa industrialisasi yang dampak negatifnya dapat menimbulkan pengangguran, mulai pudarnya nilai dan norma serta upacara tradisional pada suatu masyarakat dan sebagainya.

Menurut **Selo Sumarjan**, globalisasi adalah terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama (**Effendi, dkk, 2005:131**). Dengan globalisasi masyarakat di kota-kota besar di Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya berkecenderungan menyatu dengan perkembangan dunia. Perkembangan yang paling menarik dan memikat adalah perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, industri, media massa, dan pariwisata. Jadi pada dasarnya globalisasi adalah suatu perubahan sosial budaya di seluruh dunia yang berlangsung secara cepat dan bersifat evolusi. Unsur-unsur budaya luar dalam konteks globalisasi adalah nilai-nilai budaya yang berkembang bersamaan dan sejalan dengan perkembangan industri. Nilai-nilai budaya barat yang merupakan unsur budaya luar tersebut antara lain : keterbukaan, bersikap demokratis, menghargai

waktu, memiliki perencanaan, percaya diri, rasionalisasi, menghargai hakikat manusia, lebih percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi, tanggung jawab dan keberanian untuk bersaing/kompetisi.

Globalisasi dapat menimbulkan dampak sampingan terhadap budaya Indonesia. Dampak sampingan itu dapat bersifat positif dan dapat bersifat negatif. Globalisasi terbentuk oleh adanya kemajuan teknologi, yang merupakan hasil perkembangan kebudayaan yang merupakan bagian yang melekat pada diri manusia. Antara kebudayaan dan IPTEK tidak hanya berkaitan satu sama lain melainkan juga terdapat hubungan timbal balik. Kemajuan pemikiran manusia dalam bentuk kemajuan kebudayaan mendorong majunya IPTEK dan begitu pula sebaliknya. Penerapan IPTEK dapat berdampak positif, namun dapat pula berdampak negatif. IPTEK sebagai produk budaya dalam perkembangan dan penerapannya menuntut tanggung jawab. IPTEK dikembangkan dan diterapkan untuk diabdikan pada kesejahteraan umat manusia.

Kemampuan bangsa Indonesia (terutama generasi muda) untuk menerapkan dampak positif era modernisasi dan globalisasi dewasa ini, akan mampu menyingkirkan dampak negatifnya, sekaligus membangkitkan jiwa Nasionalis dan Patriotis dalam diri kita semua.

Salah satu cara yang dianggap tepat untuk mengatasi pengaruh negatif era modernisasi dan globalisasi di negara kita, adalah dengan cara *filterisasi* berbagai pengaruh negatif tersebut dengan nilai-nilai agama dan Pancasila. Mengapa demikian ? Agama merupakan barometer kehidupan manusia, yang berisi tentang berbagai firman Allah yang tak diragukan lagi kebenarannya. Agama merupakan pedoman dalam kehidupan manusia, tak terkecuali bangsa Indonesia.

.....

Sementara itu, Pancasila merupakan dasar Negara sekaligus Pandangan Hidup bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup, Pancasila merupakan pedoman dalam kehidupan bangsa Indonesia sehari-harinya. Dengan kata lain Pancasila adalah ukuran tingkah laku manusia Indonesia. Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, digali dari nilai-nilai luhur budaya bangsa kita sendiri, tanpa meniru dari bangsa lain. Karena itu bangsa Indonesia lahir dengan kepribadian sendiri yang bersamaan dengan lahirnya bangsa dan negara Indonesia, kepribadian tersebut ditetapkan sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia.

Dapat kita ibaratkan Pancasila sebagai pohon yang hendaknya terus tumbuh menjulang tinggi, mengayomi bangsa dan negara Indonesia. Maka syarat mutlak yang harus dimilikinya adalah bahwa akar-akar pohon itu harus terus menerus lebih mengakar ke bumi budaya Indonesia. Semakin dalam akar-akarnya menancap, semakin kokoh pula pohon tersebut. Semakin tinggi tumbuhnya, semakin rindang pengayomannya. Akar-akar pohon Pancasila itu tak lain terwujud dalam nilai-nilai kelima silanya, yaitu nilai KeTuhanan, nilai Nasionalisme dan Patriotisme yang berperikemanusiaan, yang berkerakyatan serta berkeadilan sosial. Sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang baik, hendaknya kita mampu memahami pentingnya pengamalan nilai-nilai Pancasila tersebut, sebagai filter dalam memaknai berbagai fenomena dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia.

#### **4.2.2. Seberapa Besar Andil Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Sarana Pendidikan Demokrasi dalam Membangkitkan Jiwa Nasionalis dan Patriotis Mahasiswa**

Berdasarkan proses wawancara mendalam dengan para responden diperoleh keterangan, bahwa andil atau peran Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

sebagai sarana Pendidikan Demokrasi dalam membangkitkan jiwa Nasionalis dan Patriotis mahasiswa cukup besar. Hal itu tercermin dari pendapat-pendapat sebagai berikut :

- a) Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Mata Kuliah yang membahas sejarah, cara pandang negara Indonesia, kebudayaan dan kerukunan hidup bangsa Indonesia yang bersifat majemuk (beranekaragam), mempunyai andil untuk merefleksikan kehidupan para pendahulu kita kepada generasi muda, diantaranya yang meliputi semangat juang yang tanpa pamrih dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa.
- b) Peran Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dalam upaya menumbuhkembangkan jiwa Nasionalisme dan Patriotisme mahasiswa cukup signifikan dan memberi kontribusi yang cukup besar, sebab :
  - Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan telah membekalkan konsep akan pentingnya jiwa Nasionalisme dan Patriotisme yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari
  - Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan telah mengenalkan sejumlah bukti kejayaan bangsa Indonesia di masa lalu (misalnya berbagai bangunan bersejarah yang dibangun dengan konsep gotong royong sebagai bukti tingginya peradaban nenek moyang kita) dalam sebuah perjalanan sejarah menuju bangsa yang bermartabat
- c) Peran Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sangat sentral untuk meningkatkan moral kehidupan dan kebangsaan secara baik, guna mewujudkan suatu kehidupan negara yang lebih baik di masa yang akan datang
- d) Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan menjadi media utama untuk membina

.....

mahasiswa agar dapat menjadi seorang Warga Negara Indonesia yang baik, sebab dalam Mata Kuliah ini membekalkan konsep kriteria WNI yang baik, yang dapat menyeimbangkan pelaksanaan hak dan kewajibannya serta mampu menjadi *patriot* bagi bangsanya

e) Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan merupakan sarana atau media pembelajaran demokrasi yang benar bagi para mahasiswa, sebab dalam mata kuliah ini dibekalkan konsep tentang kewarganegaraan, kenegaraan, serta apa-apa saja hak dan kewajiban warga negara (termasuk mahasiswa) terhadap bangsa dan negara Indonesia

Sejarah perkembangan kehidupan kenegaraan Indonesia mengalami suatu perubahan dan perkembangan yang sangat besar terutama berkaitan dengan gerakan reformasi. Reformasi di bidang hukum dan politik telah banyak dilakukan, namun kenyataannya tidak membawa perubahan yang berarti dalam kehidupan rakyat, terutama menyangkut kesejahteraan, baik lahir maupun batin. Selain itu, pasca reformasi dewasa ini semua warga negara merasakan betapa sangat rapuhnya jiwa Nasionalisme dan Patriotisme Indonesia, terutama di kalangan generasi muda. Hal ini diantaranya dilatarbelakangi oleh terjadinya berbagai permasalahan di negara kita akhir-akhir ini yang banyak menimbulkan kekecewaan dalam diri rakyat Indonesia, tak terkecuali generasi mudanya.

Setiap warga negara dituntut untuk dapat hidup berguna dan bermakna bagi negara dan bangsanya, serta mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan masa depannya. Untuk itu diperlukan penguasaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai moral, nilai kemanusiaan dan nilai-nilai budaya bangsa. Nilai-nilai dasar tersebut berperan sebagai



panduan dan pegangan hidup setiap warganegara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, sebenarnya dilakukan dan dikembangkan di seluruh dunia dengan istilah atau nama yang berbeda-beda, seperti *civic education*, *citizenship education*, bahkan ada yang menyebut *democracy education*. Mata Kuliah ini mempunyai peran yang sangat strategis untuk mempersiapkan warganegara yang cerdas, bertanggung jawab dan berkeadaban. Berdasarkan rumusan *Civic International* (1995), disepakati bahwa pendidikan demokrasi penting untuk pertumbuhan civic culture, untuk keberhasilan pengembangan dan pemeliharaan pemerintahan demokrasi (**Mansoer, 2005**).

Mata Kuliah *Pendidikan Kewarganegaraan* di Indonesia, secara formal mulai diajarkan di Perguruan Tinggi pada Tahun Ajaran 1973/1974, dengan nama *Pendidikan Kewiraan*, yang dimaksudkan sebagai sebuah Pendidikan Pendahuluan Bela Negara di Tahap Lanjut, dengan tujuan menumbuhkan kecintaan pada tanah air (nasionalisme) Indonesia.

Mata Kuliah tersebut akhirnya berganti nama menjadi Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan SKEP Dirjen DIKTI No. 267/DIKTI/Kep/2000. Kemudian, dengan berlandaskan SKEP Dirjen DIKTI No. 43/DIKTI/Kep/2006 tentang, "Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi", ditetapkan bahwa Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bagian Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian yang wajib diberikan di semua Fakultas dan Jurusan di seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia, bersama-sama dengan Mata Kuliah Agama dan Bahasa Indonesia.

**Kaelan (2007:4)** menyatakan, bahwa objek material dari Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan adalah segala hal yang berkaitan dengan warganegara

baik yang bersifat empirik maupun non empirik, yang meliputi sikap, wawasan dan perilaku warganegara dalam kesatuan bangsa dan negara. Sedangkan objek formalnya mencakup dua segi yaitu, segi hubungan antara warganegara dengan negara (termasuk hubungan antar warganegara) dan segi pembelaan negara. Dalam hal ini pembahasan Pendidikan Kewarganegaraan terarah pada Warga Negara Indonesia dalam hubungannya dengan negara Indonesia dan pada upaya pembelaan negara Indonesia.

Objek Pembahasan Pendidikan Kewarganegaraan menurut SKEP Dirjen DIKTI No. 43/DIKTI/Kep/2006, dijabarkan secara lebih terperinci melalui pokok-pokok bahasan sebagai berikut :

- 1) Filsafat Pancasila
- 2) Identitas Nasional
- 3) Negara dan Konstitusi
- 4) Demokrasi Indonesia
- 5) Rule of Law dan Hak Asasi Manusia
- 6) Hak dan Kewajiban Warganegara serta Negara
- 7) Geopolitik Indonesia
- 8) Geostrategi Indonesia

Dengan adanya penyempurnaan kurikulum Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian tersebut di atas, maka Pendidikan Kewarganegaraan memiliki paradigma baru, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan berbasis Pancasila. Kiranya akan menjadi sangat relevan jikalau Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi dewasa ini dijadikan sintesis antara *civic education*, *democracy education*, serta *citizenship education*, yang berlandaskan Filsafat Pancasila, serta mengandung muatan Identitas Nasional Indonesia, serta muatan makna Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (Mansoer, 2005).

.....

Dari berbagai pernyataan tersebut di atas dapatlah disimpulkan, bahwa keberadaan Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian dari Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi mempunyai andil yang cukup besar dan sangat penting sebagai sarana pendidikan demokrasi dalam diri mahasiswa.

Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, berperan untuk menanamkan, mengarahkan dan menumbuhkembangkan jati diri bangsa Indonesia dalam kepribadian mahasiswa. Melalui pembelajaran materi perkuliahan ini mahasiswa diajak untuk melihat keberadaan bangsa dan negara Indonesia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Sikap-sikap dasar inilah yang merupakan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa yang harus tetap dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, sebagai upaya membangkitkan jiwa Nasionalis dan Patriotis dalam diri mahasiswa.

#### **4.2.3. Upaya-upaya yang dilakukan Para Dosen Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan untuk menjadikan Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Sarana Pendidikan Demokrasi dalam Membangkitkan Jiwa Nasionalis dan Patriotis Mahasiswa**

Mahasiswa sebagai peserta belajar dewasa harus diberikan suasana dan pendekatan belajar secara dewasa pula (andragogi) hal ini dilakukan untuk mengasah kemampuan berfikir analisis-kritis. Selain itu, proses pendidikan selama ini diduga

masih bersifat informatif dan terbatas pada pengembangan kognitif saja, sehingga belum berhasil meningkatkan kemampuan berfikir kritis-analisis, dan mengimplementasi nilai-nilai Nasionalis dan Patriotis dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sangatlah penting agar tidak lunturnya identitas nasional Bangsa di kalangan generasi muda.

Secara pragmatik, mata kuliah yang diemban tugas untuk membangkitkan jiwa Nasionalis dan Patriotis Mahasiswa adalah mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Hal ini dikarenakan Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan menekankan pada pembentukan kepribadian manusia yaitu mahasiswa yang memiliki kesadaran dalam melaksanakan hak dan kewajiban, terutama kesadaran wawasan kebangsaan dan pertahanan keamanan nasional masyarakat Indonesia

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan sejumlah Dosen Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia, diperoleh keterangan bahwa upaya-upaya yang dilakukan para Dosen Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan tersebut untuk menjadikan Mata Kuliah pendidikan Kewarganegaraan sebagai sarana pendidikan demokrasi dalam membangkitkan jiwa Nasionalis dan Patriotis Mahasiswa adalah sebagai berikut :

- 1) *Faktor Internal* (dari dalam diri mereka) yaitu melalui *peneladanan*, artinya dosen menjadikan dirinya sebagai model dalam mewujudkan jiwa Nasionalis dan Patriotis tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) *Faktor Eksternal* (dari luar diri mereka), meliputi hal-hal sebagai berikut :
  - a. Pemilihan materi yang bervariasi, serta penggunaan metode dan media yang tepat dalam perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan
  - b. Menciptakan iklim perkuliahan yang mampu menumbuhkan rasa kesadaran dan memiliki terhadap bangsa dan negara Indonesia



- c. Memberikan pemahaman yang benar atau kontribusi positif terhadap mahasiswa tentang sikap dan perilaku apa yang seharusnya dilakukan oleh mereka sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang baik, dalam menghadapi berbagai fenomena yang terjadi di sekitar kehidupan mereka.

Dalam pola pendidikan Islami, **Ulwan (1990)** menyatakan bahwa, pendidikan dengan keteladanan (*Uswah*) merupakan pola pertama yang harus diterapkan agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Keteladanan adalah pendidikan dalam metode influentif yang paling meyakinkan keberhasilannya dalam mempersiapkan dan membentuk anak di dalam moral, spiritual, dan sosial. Hal ini karena pendidik (orang tua) adalah contoh terbaik dalam pandangan anak dan dapat dengan mudah dilihat dan ditiru. Itulah sebabnya Allah SWT menjadikan Rasulullah SAW sebagai Al-Uswah buat orang-orang yang beriman, sebagaimana tertera dalam firman Allah berikut ini, "Sesungguhnya bagi kalian pada diri Rasulullah ada uswah yang baik" (**QS.33:21**).

Peneladanan yang ditunjukkan oleh para Dosen mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dalam perannya sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang baik (termasuk dalam mewujudkan jiwa Nasionalis dan patriotis), diharapkan mampu menggugah kesadaran para mahasiswa untuk mewujudkan hal yang sama.

Selanjutnya, yang berhubungan langsung dengan proses perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan adalah yang menyangkut *Materi, Metode* dan *Media*.

Agar tujuan Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan, upaya Dosen yang berhubungan dengan *materi* Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut :

\* Penyajian materi harus mampu menggugah potensi mahasiswa, terutama dalam

.....

upaya membangkitkan jiwa Nasionalisme dan Patriotisme mahasiswa. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan menyeimbangkan penyampaian materi yang bersifat teoritis dengan materi yang bersifat aplikatif, sehingga bahan ajar (materi) tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan yang riil terutama dalam penerapan dan pembangkitan jiwa Nasionalis dan Patriotis di kalangan Mahasiswa

\* Penyajian materi harus bersifat variatif. Dalam hal ini Dosen harus mampu menghubungkan bahan ajar dengan fenomena yang terjadi di masyarakat. Jadi materi tidak hanya disampaikan secara teoritis saja (dengan bobot dominan di aspek kognitif), tetapi hendaknya diperhatikan penyajian materi dari aspek afektifnya.

Dengan mencoba menyajikan materi secara bervariasi, lalu dihubungkan dengan fenomena yang sedang berkembang di masyarakat, serta dengan memperhatikan ketercapaian tujuan di aspek afektifnya, diharapkan kebermaknaan materi tersebut dapat terinternalisasi dalam diri mahasiswa, serta mereka pun mampu mengaplikasikan materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, yang berhubungan dengan *metode* perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan, upaya penyempurnaan yang dilakukan oleh para Dosen adalah sebagai berikut :

Menggunakan metode perkuliahan yang lebih bervariasi, dengan mencoba menampilkan sebuah metode atau pendekatan yang berbeda dengan yang bisa dilakukan selama ini, seperti ceramah dengan tanya jawab; diskusi, agar tidak terkesan monoton, dan dapat menghindari kejenuhan yang dialami mahasiswa saat mengikuti perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan.

Pendekatan yang sekarang dicoba untuk diterapkan dalam perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan adalah *Pendekatan Portofolio*. **Winataputra (2002, 31)** menyatakan bahwa **portofolio** adalah tampilan visual dan audio yang disusun secara

sistematis melukiskan proses berfikir yang didukung oleh seluruh data yang relevan, sehingga secara utuh melukiskan “integrated learning experiences” atau pengalaman belajar terpadu yang dialami oleh mahasiswa dalam kelas sebagai suatu kesatuan. Dengan demikian model pembelajaran berbasis portofolio merupakan pembelajaran yang melibatkan mahasiswa secara aktif dan kooperatif mulai dari menentukan masalah secara demokratis, mengumpulkan data, mengoleksi data, menampilkan data, menentukan solusi permasalahan sehingga dia mampu menilai dan mempengaruhi kebijakan umum dari hasil temuannya. Model portofolio ini merupakan suatu inovasi pembelajaran yang dirancang untuk membantu peserta didik memahami teori secara mendalam melalui pengalaman belajar praktik-empirik. Model portofolio ini dapat menjadi program pendidikan yang mendorong kompetensi, tanggungjawab, dan partisipasi peserta didik, belajar menilai dan mempengaruhi kebijakan umum (*publik policy*), memberanikan diri untuk berperan serta dalam kegiatan antarmahasiswa, antar perguruan tinggi dan antar anggota masyarakat. Dengan demikian, fokus pembelajaran dengan pendekatan portofolio dikonsentrasikan pada keaktifan mahasiswa dalam aspek fisik, intelektual, sosial, mental, emosional dan spiritual. Mahasiswa yang diberikan mata kuliah PKn dengan pendekatan portofolio akan memiliki perkembangan kognisi dan psikososial yang lebih baik, mengembangkan keterampilan hidup (*life skills*) tentang dirinya dan terhadap orang lain yang berbeda dari diri mereka, serta memperkuat penerimaan dan toleransi terhadap perbedaan-perbedaan. Dan hal ini diharapkan juga berpengaruh terhadap bangkitnya jiwa Nasionalis dan Patriotis dalam diri mahasiswa.

Selanjutnya, tentang *media* yang digunakan dalam perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan, upaya yang dilakukan para Dosen adalah dengan memanfaatkan kemajuan di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam menyampaikan berbagai

materi perkuliahan, misalnya dengan menggunakan LCD dan program Power Point, sehingga menghasilkan tampilan yang lebih menarik. Kekonsistenan Dosen dalam melakukan berbagai upaya tersebut di atas pada saat memberikan perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan khususnya, diharapkan mampu mewujudkan peran Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sarana pendidikan demokrasi dalam membangkitkan jiwa nasionalis dan patriotis Mahasiswa.

---

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian tentang, "Peran Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Sarana Pendidikan Demokrasi dalam Membangkitkan Jiwa Nasionalis dan Patriotis Mahasiswa" (Suatu Studi terhadap Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan melemahnya jiwa Nasionalisme dan Patriotisme mahasiswa adalah sebagai berikut :
  - a) *Faktor Internal* (yang berasal dari dalam diri mereka), terdiri atas :



- Ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan mahasiswa terhadap sejarah perjuangan para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia
  - Kurangnya pemahaman mahasiswa tentang karakteristik identitas nasional bangsa, serta pentingnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
  - Kurangnya kesadaran mahasiswa tentang pentingnya kepemilikan jiwa Nasionalisme dan Patriotisme
  - Tumbuhnya sikap hidup individualistik (mementingkan diri sendiri) dalam diri mahasiswa, sehingga mengakibatkan mereka abai terhadap kepentingan orang lain, termasuk juga kepentingan bangsa dan negara
  - Tumbuhnya sikap hidup *hedonis* (pemuja kenikmatan duniawi) di kalangan mahasiswa, yang mengakibatkan mereka hanya mengejar kesenangan diri tanpa peduli terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di sekitar kehidupan mereka
  - Kekecewaan dalam diri mahasiswa, akibat berbagai fenomena yang terjadi di negara kita, seperti krisis multi dimensional sejak berakhirnya pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto; masih maraknya praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) serta berbagai tindak kriminal lain yang dilakukan oleh sejumlah oknum pejabat atau wakil rakyat di negara kita; adanya berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai kurang memihak kepada kepentingan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, misalnya keputusan untuk menaikkan harga BBM dan sebagainya
- b) *Faktor Eksternal* (yang berasal dari luar diri mereka), terdiri atas :
- Pengaruh negatif era globalisasi dan modernisasi, yang cenderung membuat
- .....

mahasiswa lebih mengagung-agungkan budaya dan produk negara lain; cenderung melupakan kebudayaan nasional dan mengabaikan barang-barang produksi dalam negeri sendiri

- Tumbuhnya *westernisasi* (gaya hidup kebarat-baratan) di kalangan mahasiswa sebagai akibat dari pesatnya arus informasi dan globalisasi dan lemahnya kemampuan *filterisasi* (penyaringan) dalam diri mahasiswa
- Kurangnya *event-event* yang menampilkan pagelaran seni kebudayaan daerah, yang diharapkan mampu menumbuhkan rasa bangga dalam diri mahasiswa terhadap kekayaan kebudayaan nasional bangsa Indonesia

.....

- Kurangnya peneladanan dari orang tua dan guru tentang perwujudan jiwa Nasionalisme dan Patriotisme dalam kehidupan sehari-hari

2. Andil Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sarana pendidikan demokrasi dalam membangkitkan Jiwa Nasionalis dan Patriotis Mahasiswa cukup besar dan signifikan, diantaranya untuk merefleksikan semangat juang para pahlawan bangsa yang tanpa pamrih dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa; menjadi sarana pendidikan demokrasi yang baik bagi mahasiswa, sehingga menjadi seorang Warga Negara Indonesia yang baik, yang dapat menyeimbangkan pelaksanaan hak dan kewajibannya serta mampu menjadi *patriot* bangsanya
  3. Upaya-upaya yang dilakukan para Dosen Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan untuk menjadikan Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sarana
- .....

pendidikan demokrasi dalam membangkitkan jiwa Nasionalis dan Patriotis mahasiswa adalah sebagai berikut :

a) *Faktor Internal* (dari dalam diri mereka) yaitu melalui *peneladanan*, artinya Dosen menjadikan dirinya sebagai model dalam mewujudkan jiwa Nasionalis dan Patriotis tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

b) *Faktor Eksternal* (dari luar diri mereka), meliputi hal-hal sebagai berikut :

- \* Pemilihan materi yang bervariasi, serta penggunaan metode dan media yang tepat dalam perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan
- \* Menciptakan iklim perkuliahan yang mampu menumbuhkan rasa kesadaran dan memiliki terhadap bangsa dan negara Indonesia
- \* Memberikan pemahaman yang benar atau kontribusi positif terhadap mahasiswa tentang sikap dan perilaku yang seharusnya dilakukan oleh mereka sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang baik, dalam menghadapi berbagai fenomena yang terjadi di sekitar kehidupan mereka.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan kegiatan penelitian yang dilakukan akan diajukan sejumlah saran sebagai berikut :

1. Perlu ditingkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang sejarah perjuangan para pahlawan bangsa dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan, sehingga dapat membangkitkan jiwa Nasionalis dan Patriotis dalam diri mahasiswa
2. Perlu ditumbuhkan kemampuan yang lebih maksimal dalam diri mahasiswa untuk *memfilter* (menyaring) berbagai dampak negatif era globalisasi dan modernisasi

(seperti sifat *individualistik*, *westernisasi*, *hedonis* dan sebagainya), diantaranya dengan cara peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari

3. Perlu lebih dimaksimalkan peran Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sarana pendidikan demokrasi di Indonesia, melalui kekonsistenan para Dosen (Pengajar)-nya dalam mencoba menyampaikan materi secara lebih bervariasi, juga pemakaian metode/pendekatan serta media yang sesuai dengan karakteristik Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan
4. Perlu perhatian khusus dari pihak Universitas Pendidikan Indonesia, untuk segera menyesuaikan bobot sks untuk sejumlah Mata Kuliah yang termasuk ke dalam Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian, termasuk Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan didalamnya (dari 2 sks menjadi 3 sks), sesuai dengan SKEP Dirjen DIKTI No. 43/DIKTI/Kep/2006, tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi

.....  
**DAFTAR PUSTAKA**

- Alamudi, Abdullah (ed), 1991. *Apakah Demokrasi Itu ?*, Jakarta, USIA
- Azra, Azyumardi, 2002. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional dan Rekonstruksi dan Demokratisasi*, Jakarta, Kompas
- Bahmueller, Charles F., 1996. *The Futuree of Democracy*, ERIC/Poland Book
- Budiardjo, Miriam, 1989. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia
- Budiyanto, 2004. *Kewarganegaraan untuk SMA Kelas X*, Jakarta, Erlangga
- DIKTI, 2005. *Kursus Calon Dosen Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)*, Jakarta
- Effendi, Ridwan, dkk., 2005. *Pendidikan Sosial Budaya dan Teknologi*, Bandung, Value Press
- Effendi, Ridwan dan Malihah, Elly, 2007. *Panduan Kuliah Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya dan Teknologi*, Bandung, CV. Yasindo Multi aspek
- Ganeswara, Ganjar. M, dkk., 2008. *Panduan Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, Bandung, CV. Yasindo Multi Aspek

- Garna, Judistira K., 1990. *Teori-teori Ilmu Sosial*, Program Pasca Sarjana UNPAD Bandung
- Hidayat, Mupid, dkk., 2007. *Pengembangan Pendekatan Pembelajaran Portofolio pada Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis-Analisis Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia*, Laporan Penelitian
- Kaelan, 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perhuruan Tinggi Berdasar SK DIRJEN DIKTI No. 43/DIKTI/KEP/2006*, Yogyakarta, Paradigma
- Madjid, Nurcholis, 1999a, *Asas-asas Pluralisme dan Toleransi dalam Masyarakat Madani*, Pidato Halal-Bihalal, Kahmi, 28 Januari 1999
- \_\_\_\_\_, 1999b. *Masyarakat Madani dan Investasi Demokrasi*, Jakarta, Republika 10 Agustus 1999
- Mansoer, Hamdan, 2004. *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta, Ditjen DIKTI-Depdiknas
- \_\_\_\_\_, 2005. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional DIKTI Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi
- \_\_\_\_\_, 2006. *Acuan Pembelajaran Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan*, Makalah pada Pelatihan Dosen Kewarganegaraan, Jakarta, Dirjen DIKTI,
- Mulyana, Deddy dan Rakhmat, Jalaluddin, 2000. *Komunikasi Antarbudaya*, Bandung, Remaja Rosdakarya
- Martodirdjo, Haryo. S., 1991. *Orang Tugutil di Halmahera Struktur dan Dinamika Sosial Masyarakat Penghuni Hutan*, Disertasi Program PASCA SARJANA UNPAD Bandung
- Mertodipuro, Sumantri, 1984. *Nasionalisme Arti dan Sejarahnya*, Jakarta, Erlangga
- Miles dan Huberman (Alih Bahasa T.R. Rohidi), 1992. *Analisa Data Kualitatif*, Jakarta, Universitas Indonesia
- Nasir, Moh, 1985. *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Nasution, S, 1992. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung, Tarsito
- Notosusanto, Nugroho, 1985. *Menegakkan wawasan Almamater*, Jakarta, UI PRESS
- Poerwadarminta, W.J.S., 1985. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka
- Rusidi, 1993, *Pedoman Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*, Bandung, IKOPIN

- Sudarsono, J. (1992). *Fostering Democratic Living: The Roles of Governmental and Community Agencies*, Bandung, CICED
- Sudirwo, Daeng (2006). *Pendidikan Kewarganegaraan pada Perguruan Tinggi Berdasarkan SK Dirjen Dikti No. 43/DIKTI/KEP/2006*, Bandung, Randu Alas
- Soekarno, 1965. *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jakarta, Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi
- Tilaar, HAR, 1998. *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad ke 21*, Jakarta, Tera Indonesia
- \_\_\_\_\_, 1999. *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya
- Tim ICCE UIN Jakarta, 2005. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta, Prenada Media
- Ulwan Abdullah Nashih, 1990. *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam Jilid 2*, Bandung, Asy-Syfa
- Universitas Pendidikan Indonesia, 2008. *Kurikulum Ketentuan Pokok dan Struktur Program*, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung
- Vredenberg, J., 1978. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia
- Wildan, Dadan, 2003. *Masyarakat madani*, Bandung, Modul Pembelajaran Bidang Studi Sosiologi dan Antropologi dalam Pelatihan Program Sertifikasi: Penyegaran Guru IPS MA Jawa Barat
- Winataputra, Udin. S., 2006, *Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi*, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional DIKTI Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi
- Zamroni, 2001. *Pendidikan untuk Demokrasi Tantangan Menuju Civil Society*, Yogyakarta, Bigraf Publishing

#### **DOKUMEN-DOKUMEN :**

1. UUD 1945
2. UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang, "Sistem Pendidikan Nasional"
3. SKEP Dirjen DIKTI No. 267/DIKTI/KEP/2000 tentang, "Perubahan Nama Mata Kuliah Pendidikan Kewiraan menjadi Mata Kuliah pendidikan Kewarganegaraan
4. TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2001 tentang, "Visi Indonesia 2020"

5. SKEP Dirjen DIKTI Nomor 38/DIKTI/KEP/2002 tentang, “Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian”
6. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang, Sistem Pendidikan Nasional”
7. SKEP Dirjen DIKTI Nomor 43/DIKTI/KEP/2006 tentang, “Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi”

## **LAMPIRAN**



## Instrumen Penelitian

**PERAN MATA KULIAH PKN SEBAGAI SARANA  
PENDIDIKAN DEMOKRASI DALAM MEMBANGKITKAN  
JIWA NASIONALIS DAN PATRIOTIS MAHASISWA**  
(Studi pada Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Bandung)

Oleh

Dra Wilodati, M.Si  
Dr. Elly Malihah, M.Si  
Dra Siti Komariah, M.Si  
Siti Nurbayani K, S.Pd, M.Si



JURUSAN MKDU  
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
BANDUNG  
2008  
Instrumen Penelitian

PERAN MATA KULIAH PKN SEBAGAI SARANA  
PENDIDIKAN DEMOKRASI DALAM MEMBANGKITKAN  
JIWA NASIONALIS DAN PATRIOTIS MAHASISWA  
(Studi pada Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Bandung)

PEDOMAN WAWANCARA

A. Untuk Mahasiswa :

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan melemahnya jiwa nasionalis dan patriotis dalam diri mahasiswa ?
2. Seberapa besar andil mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sarana Pendidikan Demokrasi dalam membangkitkan jiwa nasionalis dan patriotis mahasiswa ?

nalis dan patriotis mahasiswa ?

B. Untuk Dosen :

Upaya apa yang dilakukan oleh para dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan untuk menjadikan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah sarana pendidikan demokrasi dalam membangkitkan jiwa nasionalis dan patriotis mahasiswa ?

---

### CURRICULUM VITAE

#### A. IDENTITAS

Nama Lengkap	: Wilodati, Dra., M.Si.
Tempat/Tanggal Lahir	: Yogya, 14 Januari 1968
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Status Marital	: Menikah
NIP	: 131998645
Pangkat/Golongan	: Penata Tk I/III d
Jabatan	: Lektor
Pekerjaan	: Dosen Jurusan MKDU FPIPS UPI Bandung
Alamat	: Komp. Pharmindo Jl. Trowulan IV T 2 No. 8-9 Cimahi 40534
Telp./ HP	: (022) 6060993 / 08179237700
Bidang Keahlian	: 1. Pendidikan Nilai 2. Sosiologi

## **B. RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. SD YKPPK Bandung, Tahun 1980.
2. SMP Pasundan VI Bandung, Tahun 1983.
3. SMUN 13 Bandung, Tahun 1986.
4. S1 (Sarjana) Jrs. PMPKN FPIPS IKIP Bandung, Tahun 1991.
5. S2 (Magister) Bidang Kajian Sosiologi Antropologi Universitas Padjadjaran, Tahun 2003.

## **C. RIWAYAT PEKERJAAN**

1. Dosen Mata Kuliah Pendidikan Pancasila Universitas Pendidikan Indonesia, sejak tahun 1991
2. Dosen Mata Kuliah Ilmu Sosial Dasar (ISD), Ilmu Budaya dasar (IBD) dan Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya dan Teknologi (PLSBT), sejak tahun 1991
3. Dosen Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sejak tahun 2006
4. Instruktur pada pelatihan guru Sosiologi/Antropologi, Kanwil Depag Jawa Barat, 2003
5. Penilai Buku Ajar Nasional untuk Buku PKn (Pendidikan Kewarganegaraan) SD, pada bulan Juni dan Agustus 2008, di Bogor, Pelaksana PUSBUK dan BSNP

## **D. PENELITIAN**

1. Korelasi antara perolehan nilai mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan Moral Reasoning Mahasiswa dalam kehidupan sehari-harinya (Proyek OPF IKIP Bandung, 1994)
2. Korelasi antara perolehan nilai bidang studi PMP dengan pencerminan jiwa, semangat dan nilai-nilai 1945 dalam kehidupan sehari-harinya (Proyek OPF IKIP Bandung, 1994)
3. Studi tentang pelaksanaan Team Teaching pada pengajaran MKDU di lingkungan IKIP Bandung (Proyek OPF IKIP Bandung, 1994)
4. Karakteristik masyarakat perkotaan ditinjau dari aspek kependudukan dan wilayah -

- nya (1998, mandiri)
5. Pengaruh terpaan komunikasi antar persona terhadap sikap dan perilaku antar etnik (Studi Kasus terhadap etnik Jawa & etnik Cina di Kelurahan Cijerah Kecamatan Bandung Kulon Kodya Bandung (1998, mandiri)
  6. Sistem tatanan masyarakat dan Kebudayaan orang Baduy (Suatu Kajian terhadap perubahan sosial dan kelestarian nilai-nilai tradisional masyarakat Baduy (1999, mandiri)
  7. Peranan “Stimulasi Diskusi Moral” di dalam Mengembangkan Penalaran Moral Mahasiswa, (DIK, 2004, anggota)

#### **E. ARTIKEL ILMIAH**

1. Sistem Tatanan Masyarakat dan Kebudayaan Baduy, Jurnal “Sosio-Religi”, Vol. 2 no.1, 2004
2. Sistem Perladangan Masyarakat Baduy, Jurnal “Percikan”, Vol. 58 Edisi September, 2005
3. Tuntutan Mobilitas Horizontal/Geografis yang berakibat Kurang Teratur dan Intensifnya Kontak antar Keluarga sebagai salah satu Faktor Penyebab Disorganisasi Keluarga Tradisional pada Masyarakat Perkotaan, Jurnal “Percikan” Vol. 62 Edisi Pebruari 2006
4. Pengoptimalisasian Kembali Fungsi Keluarga sebagai Peletak Dasar Kepribadian Anak, Jurnal “Percikan” Vol. 62 Edisi Pebruari 2006

#### **F. PENULISAN MODUL DAN BUKU**

1. Tim Penulis Buku Tugas Belajar Mandiri Mata Kuliah Pendidikan Pancasila, 2000, Bandung, CV. Maulana.
2. Tim Penulis Modul Pelatihan Sosiologi Antropologi bagi guru-guru Aliyah, LPSDM, 2003
3. Tim Penulis Bahan Belajar Mandiri Pendidikan Kewarganegaraan Edisi Kesatu, (2007), Bandung: UPI Press.
4. Tim Penulis Buku Panduan Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan

Tinggi, 2008, Bandung, CV. Yasindo Multi Aspek

Bandung, 12 November 2008

Wilodati, Dra., M.Si

## **CURRICULUM VITAE**

### **1. Biodata**

Nama Lengkap : **Elly Malihah, Dr., M.Si**  
 NIP : 131999258  
 Gol/Pangkat/Jabatan : IV a / Pembina / Lektor Kepala  
 Tempat Tgl Lahir : Bogor 25 April 1968  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 Alamat : Komplek Setiabudi Regensi Wing 2  
 Jl Safir Biru IV/ 331 G  
 Bandung 40559  
 Telepon : (022) 2012332 / 0816615573  
 Status Marital : Menikah  
 Bidang Keahlian : 1. Sosiologi  
 2. Pendidikan Nilai

### **2. Pendidikan :**

1. S. 1 IKIP Bandung, jurusan PMPKN, Lulus tahun 1991
2. S.2 (Magister) Ilmu Sosial Bidang Kajian Sosiologi Universitas Padjadjaran (UNPAD) Lulus tahun 2000
3. S3 (Program Doktor) Ilmu Sosial Bidang Kajian Sosiologi Universitas Padjadjaran Bandung, Lulus tahun 2007

### **3. Pekerjaan :**

1. Dosen Mata Kuliah Pendidikan Pancasila Univ.Pendidikan Indonesia Bandung, sejak tahun 1991
2. Dosen Mata Kuliah Ilmu Sosial Dasar (ISD), Ilmu Budaya Dasar (IBD) dan Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya dan Teknologi (PLSBT), sejak 1991
3. Dosen Luar Biasa Mata Kuliah Pendidikan Pancasila Institut Teknologi Bandung (ITB) sejak 1993.
4. Instruktur pada Skill Development Project (SDP) West Java, tahun 1994 - 1998
5. Instruktur pada Institut Manajemen dan Teknologi Indonesia, sejak 1994
6. Instruktur pada Pelatihan Calon Pengembang Model Mekanisme Monitoring Tindak Kekerasan pada anak berbasis Masyarakat, LPAJabar 2003.
7. Instruktur pada pelatihan guru Sosiologi/Antropologi, Kanwil Depag Jabar, 2003

### **4. Pengalaman Riset :**

1. Studi tentang Kebijakan Pengelolaan lingkungan Hidup, di daerah Industri Kabupaten Bogor, 1997 (anggota)
2. Studi tentang pemahaman konsep Lingkungan Hidup Mahasiswa pada mata kuliah PLSBT, 1998 (Penelitian Mandiri)
3. Dampak Pembangunan Industri terhadap Kesempatan Kerja dan Pola Hidup Masyarakat Kec. Cileungsi Kab.Bogor 2000 (Penelitian Mandiri)
4. Studi tentang Evaluasi Pengajaran PMP di Kabupaten Bogor, 1999 (Penelitian mandiri)
5. Studi tentang Model Pembangunan Partisipasi masyarakat Kabupaten Bogor, 2000 (Penelitian Mandiri)
6. Studi tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah pada TPA Bantar Gebang, Bekasi, 2000 (Penelitian Mandiri)
7. Pengaruh Pengajaran Pendidikan Pancasila terhadap Kesadaran Berbangsa dan Bernegara mahasiswa Univ. Pendidikan Indonesia, 2001 (Penelitian Mandiri)

8. Efektivitas Pengajaran PLSBT terhadap Kesadaran Pemeliharaan Lingkungan, 2002 (Penelitian Mandiri)

**5. Lain-lain :**

1. Tim Penulis Pengembangan Materi Hak Azasi Manusia, DepkehHam, 2000 s.d. sekarang
2. Penulis Buku Ekonomi SLTP Kelas 1,2 dan 3 Ganeca Exact Bandung, 1994 s.d. sekarang
3. Penulis Buku Pegangan Guru Ekonomi SLTP Kelas 1, 2, dan 3 Ganeca Exact Bandung, 1994 s.d. sekarang
4. Penulis Buku Antropologi untuk SMU Kelas 3, Ganeca Exact Bandung, 1999 s.d. sekarang
5. Penulis Buku PPKN Untuk Sekolah Dasar, Saka Print, Bandung, 2002 (dalam proses)
6. Penulis Buku PPKN Untuk SMU, Saka Print, Bandung, 2001
7. Penulis Buku Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi , Gramedia Jakarta 2003
8. Penulis Buku Ilmu Sosial dan Budaya dasar untuk Perguruan Tinggi, (dalam proses), 2003
9. Menulis artikel pada berbagai Media Massa, sejak 1990.

Bandung, 12 November 2008

Elly Malihah, Dr, M.Si



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. DATA PRIBADI**

1. Nama : Dra. Hj. Siti Komariah, M.Si.
2. Tempat/Tgl Lahir : Bandung, 3 April 1968
3. Pekerjaan : Dosen FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia.
4. Pangkat/Gol. : Pembina/ IV/a
5. Jabatan : Lektor Kepala
6. NIP : 131961229
7. Agama : Islam
8. Pendidikan Akhir : Mahasiswa Program Doktor  
Bidang Kajian Sosiologi Gender, Universiti Malaya  
Kualalumpur Malaysia.
9. Alamat : Kompleks Griya Prima Asri Blok C7 No.12 Baleendah  
Bandung, Jawa Barat  
Hp. 081322507658

### **II. PENDIDIKAN**

1. Sekolah Dasar Negeri 7 Dayeuhkolot, lulus tahun 1979 di Bandung
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri Dayeuhkolot, lulus tahun 1982 di Bandung
3. Sekolah Menengah Atas Negeri XI Bandung, lulus tahun 1985 di Bandung
4. Sajana Pendidikan PMP-KN FPIPS IKIP Bandung lulus tahun 1990
5. Magister Sains Program Pascasarjana, Universitas Padjadjaran lulus tahun 1999
6. Tercatat sebagai Mahasiswa S.3 Universiti Malaya Kualalumpur Malaysia.

### **III. RIWAYAT PEKERJAAN**

1. Dosen FPIPS IKIP Bandung ( Universitas Pendidikan Indonesia), sejak tahun 1991 sampai sekarang
2. Dosen luar biasa Institut Teknologi Bandung, tahun 1999-2001
3. Dosen Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bale Bandung (STKIP Bale Bandung), tahun 1993-1995
4. Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Persatuan Islam (STAIPI), tahun 1999-2001
5. Guru Sekolah Menengah Atas Sandi Putera Bandung, tahun 1990-1992
6. Guru Sekolah Dasar Negeri Nambo Banjaran, tahun 1989-1990

#### **IV. PENGALAMAN PENELITIAN**

1. Studi Tentang Sikap Mahasiswa IKIP Bandung terhadap Masalah kependudukan dan Lingkungan Hidup (Proyek OPF IKIP Bandung, 1994, anggota)
2. Korelasi Perolehan Nilai Bidang Studi PMP dengan Pencerminan Jiwa, Semangat, dan Nilai-nilai 1945 Dalam Kehidupan Sehari-harinya (Proyek OPf, IKIP Bandung, 1994, anggota)
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi terhadap Pembangunan Wanita di Indonesia (Penelitian Mandiri, tahun 1995)
4. Implikasi Pendidikan dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Indonesia (Penelitian Mandiri, tahun 1996)
5. Kontribusi Mata Kuliah PMP terhadap pembentukan Sikap Demokratis Siswa (penelitian mandiri, tahun 1997)
6. Perkawinan di Bawah Umur di Desa Pulosari, Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung (Penelitian Mandiri, tahun 1998)
7. Kehidupan Masyarakat Pemetik Teh Banjarsari, Pangalengan, Bandung (Penelitian Mandiri, tahun 1999)
8. Upacara kematian masyarakat Desa Trunyan Bali, Suatu Studi Deskriptif atas upacara Tradisional Daur Hidup Masyarakat Bali (Penelitian Mandiri, tahun 1999)
9. Model Budaya Modernisasi Masyarakat Di Dunia Ketiga (Penelitian Mandiri, tahun 2000)
10. Proses Sosialisasi Anak dalam Keluarga Pemetik Teh (Studi Kasus di Perkebunan Malabar Pangalengan) (Penelitian Mandiri tahun 2000).
11. Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga Sunda (Penelitian Mandiri tahun 2001)
12. Perubahan Sosial pada kalangan menak Sunda, (Penelitian Mandiri tahun 2001)
13. Kedudukan Lembaga Adat Pada Masyarakat Baduy, (Penelitian Mandiri tahun 2002)
14. Peranan Wanita Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Indonesia, (Penelitian Mandiri tahun 2002)
15. Interaksi Simbolik Pada Masyarakat Dusun Kuta Ciamis, (Penelitian Mandiri tahun 2003)
16. Peranan Tempat penitipan Anak (TPA) Pada Masyarakat Pemetik Teh di Pangalengan (Penelitian Mandiri tahun 2003)
17. Peranan Pendidikan Berwawasan Teknologi dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia (Penelitian Mandiri tahun 2004)

18. Hubungan mata kuliah Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya dan Teknologi dengan sikap Mahasiswa terhadap permasalahan Sosial di Indonesia, (Penelitian Mandiri tahun 2004)
19. Peranan mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Sikap Demokratis Mahasiswa (Penelitian Mandiri tahun 2005)
20. Suatu Tinjauan terhadap Sikap Mahasiswa terhadap Permasalahan Sosial Budaya, dan Lingkungan di Indonesia, (Penelitian Mandiri tahun 2005).
21. Dampak Modernisasi dan Globalisasi dalam Masyarakat Indonesia (Penelitian Mandiri tahun 2006)
22. Peranan Wanita Indonesia, Masa Lalu dan Kini (Penelitian Mandiri tahun 2006)
23. Studi tentang gerakan Feminisme di dunia Barat dan di Indonesia (Penelitian Mandiri, tahun 2007)
24. Faktor-faktor yang Mempengaruhi terhadap peranan wanita di Indonesia (Penelitian Mandiri, tahun 2007).

## **V. PENULISAN ARTIKEL DI JURNAL ATAU DISEMINARKAN**

1. Adaptasi Pembelajaran Modern di Perguruan Tinggi, Percikan, Volume 25 Edisi Agustus 2003
2. Menjaga Kemabruran Haji, Pikiran Rakyat, Nopember 2004
3. Interaksionisme Simbolik Pada Masyarakat Dusun Adat Kuta, Percikan, Volume 63 Edisi Maret 2006
4. Kartini dan Islam, Percikan, Volume 68 Edisi Agustus 2006.
5. Gender Dalam Pandangan Islam, Percikan Iman, Volume 22 Edisi April 2005
6. Peranan Wanita dalam Pembangunan, antara peran domestik dan peran publik. Diseminarkan pada seminar Partisipasi Wanita dalam Pembangunan Indonesia, 23 Desember tahun 2004 di Universitas Pendidikan Indonesia
7. KPU dan Pemilihan Umum yang Demokratis. Diseminarkan pada Seminar Sehari tentang Konsep Pembangunan Indonesia Pasca Pemilu 2004, 13 Desember 2003 di Auditorium Perdana Siswa Universiti Malaya, Kuala Lumpur.
8. Faktor-faktor Pendorong Pergaulan Bebas di Kalangan. Diseminarkan pada Seminar Fenomena Pergaulan Bebas di Kalangan Remaja, Bandung 15 Oktober 2005
9. Strategi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Diseminarkan pada Seminar Peningkatan Kualitas Sumber Daya Insani, Bandung 4 September 2006

## **VI. PENULISAN MODUL DAN BUKU**

1. Tim Penulis Modul Pelatihan Sosiologi Antropologi bagi guru-guru Aliyah, LPSDM, 2003
2. Tim Penulis Buku Tugas Belajar Mandiri Mata Kuliah Pendidikan Pancasila, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung: Maulana.
3. Tim Penulis Bahan Belajar Mandiri Pendidikan Kewarganegaraan Edisi Kesatu, (2007), Bandung: UPI Press.

## **VII. ORGANISASI PROFESI DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN**

1. Local Expert Bidang IPS pada Institut For Religious and Islamis Studies (IRIS), Bandung (1998-2002)
2. Ketua Umum Pimpinan Cabang Pemuda Persatuan Islam (2000-2005)
3. Ketua Hubungan antar Lembaga dan Organisasi Persatuan Islam Isteri (2007 sampai sekarang)

## **VIII. KEGIATAN ILMIAH, SEMINAR, DLL**

1. Peserta pada Seminar tentang Ormas Islam dan Tantangan Perubahan Politik di Indonesia Menjelang Abad XXI, Bandung 14 Januari 1996.
2. Peserta pada Seminar Dwi Fungsi ABRI dalam Percaturan Politik Indonesia, Bandung, 13 Desember 1998
3. Peserta pada Seminar Internasional tentang Demokrasi Di Dunia Ketiga (Antara misi, Visi, dan Transformasi), Bandung 21 Maret 1999
4. Peserta pada Seminar Peningkatan Potensi Wirausaha Perempuan Dalam Upaya Pengembangan Ekonomi Keluarga, Bandung, 18 Mei 2000
5. Peserta pada Seminar Reinterpretasi Harokah Dakwah Dan Pendidikan Persis Dalam Menyikapi Fenomena Global, Bandung 8 Juni 2000
6. Peserta pada Seminar Hubungan Antara Organisasi Massa Islam Dengan Partai Politik Islam, Bandung, 22 Juli 2000
7. Local expert Bidang Studi IPS di MTS Model Jawa Barat di Serang, Pandeglang, September 2000
8. Peserta pada Seminar Nasional Membongkar Peran dan Relevansi Jaringan Islam Liberal di Indonesia, Bandung, 5 Juni 2002
9. Peserta pada Seminar Nasional Pembaharuan Pendidikan IPS , Bandung, 31 Oktober-1 Nopember 2002
10. Peserta pada Seminar dan Lokakarya Sejarah Tatar Sunda, Bandung, 8 Maret 2003
11. Pemakalah pada Seminar Sehari tentang Konsep Pembangunan Indonesia Pasca Pemilu 2004, Universiti Malaya, Kualalumpur, Malaysia, 13 Desember 2003.
12. Instruktur pada Pelatihan Guru Madrasah Aliyah Provinsi Jawa Barat, Bandung 10 -31 Agustus 2003
13. Pemakalah pada diskusi Meraih Cinta Ilahi Melalui Keluarga Sakinah, Bandung, 6 Juli 2004
14. Peserta Semiloka Pro dan Kontra RUU RI tentang Badan Hukum Pendidikan dan RPP Perguruan Tinggi, Bandung 27 Juli 2004
15. Peserta pada Seminar Financing For Education Institution Development, Bandung, 13 Oktober 2004
16. Pembicara pada seminar Partisipasi Wanita dalam Pembangunan Indonesia, Bandung, 23 Desember 2004
17. Instruktur pada Pelatihan Dakwah bil Kitabah, Bandung 12 Januari 2005
18. Pemakalah pada Seminar Fenomena Pergaulan Bebas di Kalangan Remaja, Bandung 15 Oktober 2005

19. Peserta Workshop Pengembangan Program Studi Dan Akselerasi Pelaksanaan Perkuliahan Muatan Lokal dan keguruan, Bandung, 6 Pebruari 2005
20. Peserta pada Diskusi dan Pameran 60 Tahun Indonesia Merdeka Dalam Lintasan Sejarah, Bandung 11-13 Agustus 2005
21. Peserta pada International Seminar and Interactive Dialogue on Nationalism and Patriotism in the Era of ICT (Information and Communication Technology), Bandung, 8 Mei 2006
22. Pemakalah pada Seminar Peningkatan Kualitas Sumber Daya Insani, Bandung 4 September 2006
23. Peserta Seminar dan Lokakarya Pengembangan Mata Kuliah Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya dan Teknologi, Bandung, 25-26 Juli 2007
24. Peserta Seminar Nasional tentang Konstitusi Kesultanan-Kesultanan Islam di Jawa Barat dan Banten, Bandung, 5 April 2008

#### **IX. PENATARAN**

1. Penataran Isteri/Suami Program Pendidikan Reguler Angkatan Ke XL LEMHANNAS RI di Jakarta tanggal 5 Desember 2007-12 Desember 2007.
2. TOT bagi calon Penatar P4 di Bandung tanggal 15 Pebruari 1998 – 21 Pebruari 1998

#### **X. PENGHARGAAN**

1. Piagam Tanda kehormatan Presiden Republik Indonesia, Satyalancana Karya Satya 10 tahun, tahun 2007
2. Piagam Karya Bhakti Satya Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, tahun 2005

Demikianlah Daftar Riwayat Hidup ini, saya buat dengan sebenarnya.

Bandung, 12 November 2008

Dra. Hj. Siti Komariah, M.Si

## CURRICULUM VITAE

Nama : Siti Nurbayani K, S.Pd. M.Si.  
 Nip. : 132086622  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Tempat/tgl lahir : Bandung, 11 Juli 1970  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Dosen FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia  
 Jabatan/Gol. : Lektor / III-c  
 Alamat Rumah : Jl. Dharma C-1 Komp. Pusdikajen Lembang –  
 Bandung 40391  
 Telp. (022) 2789484  
 Hp. : 08122115921  
 Alamat Kantor : Jurusan MKDU – FPIPS UPI  
 Jl. Setiabudhi 229 Bandung 40154

Pendidikan/Pelatihan yang pernah diikuti :

Jenjang	Bidang	Tahun	Tempat
S1	PMPKN	1988-1993	IKIP Bandung
S2	Sosiologi - Antropologi	1999-2004	UNPAD Bandung
Pelatihan	Pengembangan Dosen Mata kuliah Pancasila	1997	UNPAD Bandung
Pelatihan	Pelatihan Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan (PKN)	2005	Surabaya
Pelatihan	Pelatihan Nasional Dosen Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat Ilmu Sosial Budaya Dasar (ISBD) di Perguruan Tinggi	2006	Batam
Pelatihan	Pelatihan calon sosialisator (TOT) mengenai putusan MPR RI	2006	Jakarta

Mata Kuliah yang diajarkan dan dibina

No	Mata Kuliah	sks	Nama PT	Tahun
1.	Pendidikan Pancasila	2	UPI, STMB	1994 –

			Telkom Bdg	sekarang
2.	Ilmu Sosial Dasar (ISD)	2	UPI	1994 - 1998
3.	PKN	2	UPI	1998-sekarang
4.	Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya dan Teknologi (PLSBT)	2	UPI	1998-sekarang
5.	Sosiologi	2	STKIP Bandung	2001-sekarang
6.	Sosiologi Pariwisata	2	UPI	2007
7.	Pengantar Ilmu Sosial	3	UPI	2007 – sekarang

Pengalaman sebagai Penilai :

1. Penilai Buku Ajar Nasional untuk buku Sosiologi SMA di Ciloto. Bulan Maret thn 2007. Pelaksana Pusbuk dan BSNP
2. Perekapan penilaian buku ajar Sosiologi, di Jakarta, Bulan April 2007. Pelaksana BSNP

Pengalaman Penelitian :

- Perempuan dan Industri Sex (Studi kasus di pulau Batam) – 1998
- Mengungkap Kesetaraan Gender dalam sektor publik – 2000
- Dimensi-dimensi Pendorong Perubahan sosial pada masyarakat Desa Pasir Endah Kecamatan Ujung Berung Kotamadya Bandung (tim)– 2000)
- Interaksi Sosial, Stratifikasi Sosial, dan Perubahan Budaya Masyarakat Desa Pasir Endah di Kecamatan Ujung Berung Kotamadya Bandung (mandiri) – 2001
- Peranan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah (Studi Deskriptif Pelaksanaan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Garut). – 2002
- Perempuan pekerja dan peran sosialnya – 2003
- Perubahan diferensiasi peranan perempuan pekerja etnik Sunda dalam kehidupan Sosial dan keluarga – 2004
- Partisipasi Politik Perempuan (Studi terhadap aktivis politik perempuan pada parpol, ormas dan LSM di kota Bandung) - 2006

Bandung, 12 November 2008

Siti Nurbayani K, S.Pd.,M.Si

**ARTIKEL**

**PERAN MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN  
SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN DEMOKRASI DALAM  
MEMBANGKITKAN JIWA NASIONALIS DAN PATRIOTIS MAHASISWA  
(Studi Terhadap Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Bandung)**

**Disusun oleh :**

- 1. Dra Wilodati, M.Si (Ketua)**
- 2. Dr. Elly Malihah, M.Si (Anggota)**
- 3. Dra. Hj. Siti Komariah, M.Si (Anggota)**
- 4. Siti Nurbayani, S.Pd, M.Si (Anggota)**



**JURUSAN MATA KULIAH DASAR UMUM  
FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**2008**



## ARTIKEL

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penelitian ini berlatarbelakangkan : (1) Penetapan Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu bagian kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian berdasarkan SKEP Dirjen DIKTI No.43/DIKTI/Kep/2006; (2) Melemahnya jiwa Nasionalis dan Patriotis di kalangan; (3) Harapan memaksimalkan peran mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sarana pendidikan demokrasi dalam membangkitkan jiwa Nasionalis dan Patriotis mahasiswa

### **B. Perumusan Masalah**

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan melemahnya jiwa Nasionalis dan Patriotis dalam diri mahasiswa ?
2. Seberapa besar andil Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sarana pendidikan demokrasi dalam membangkitkan jiwa nasionalis dan patriotis mahasiswa ?
3. Upaya-upaya apa yang dilakukan para Dosen Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan untuk menjadikan Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sarana pendidikan demokrasi dalam membangkitkan jiwa nasionalis dan patriotis mahasiswa ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. mengetahui sejumlah faktor penyebab melemahnya jiwa nasionalis dan patriotis dalam diri mahasiswa
2. menemukan seberapa besar andil Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sarana pendidikan demokrasi dalam membangkitkan jiwa nasionalis dan patriotis di kalangan mahasiswa
3. mengetahui upaya yang dilakukan para Dosen Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan untuk menjadikan Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sarana demokrasi dalam membentuk jiwa nasionalis dan patriotis mahasiswa

### **D. Manfaat Penelitian**

- 1 . *Secara teoritis*, memberi informasi tambahan pentingnya peran Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sarana pendidikan demokrasi dalam membangkitkan jiwa Nasionalis dan Patriotis di kalangan mahasiswa.

2. *Secara praktis*, hasilnya sebagai bahan pemikiran pihak yang berkepentingan dan bertanggung jawab dalam upaya meningkatkan wawasan kebangsaan, jiwa Nasionalis dan Patriotis terutama di kalangan generasi muda bangsa Indonesia.

### **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini dikelompokkan dalam penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif.

Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa UPI sebanyak 10 orang, yang tersebar dari semua Jurusan atau Program Studi yang berasal dari semua fakultas yang ada di UPI, yang sudah mengontrak Mata Kuliah PKn pada Tahun Ajaran 2006/2007 atau pada tahun Ajaran 2007/2008. Informan pokoknya adalah sejumlah Dosen Mata Kuliah PKn UPI

Data Sekunder diperoleh dari hasil observasi dan kaji literatur berbagai peraturan yang berkaitan dengan keberadaan Mata Kuliah PKn. Data Primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan para responden dan sejumlah informan. Pada akhirnya kedua data tersebut digabungkan, dianalisis dan disempurnakan dengan berbagai kajian pustaka sehingga memperoleh hasil yang diharapkan.

### **F. Hasil dan Pembahasan**

1. Faktor-faktor yang menyebabkan melemahnya jiwa Nasionalisme dan Patriotisme mahasiswa adalah sebagai berikut :
  - a) *Faktor Internal* (yang berasal dari dalam diri mereka), terdiri atas :
    - (1) Kurangnya pengetahuan mahasiswa terhadap sejarah perjuangan pahlawan bangsa;
    - (2) Kurangnya pemahaman tentang karakteristik identitas nasional, pentingnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, pentingnya kepemilikan jiwa Nasionalisme dan Patriotisme;
    - (3) Tumbuhnya sikap hidup *individualistik* dan *hedonis*;
    - (4) Kekecewaan akibat berbagai fenomena yang terjadi di negara kita
  - b) *Faktor Eksternal* (yang berasal dari luar diri mereka), terdiri atas :
    - (1) Pengaruh negatif era globalisasi dan modernisasi;
    - (2) Tumbuhnya *westernisasi*;
    - (3) Kurangnya *event-event* yang menampilkan pagelaran seni kebudayaan daerah;
    - (4) Kurangnya peneladanan dari orang tua dan guru tentang perwujudan jiwa Nasionalisme dan Patriotisme dalam kehidupan sehari-hari
2. Andil Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sarana pendidikan demokrasi dalam membangkitkan Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme Mahasiswa adalah cukup besar dan sangat penting untuk: (a) merefleksikan perjuangan

pahlawan bangsa; (2) mengenalkan bukti kejayaan bangsa Indonesia di masa lalu; (3) Sarana pendidikan demokrasi yang baik untuk membina mahasiswa menjadi seorang WNI yang baik

3. Upaya-upaya Dosen Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan untuk menjadikan Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sarana pendidikan demokrasi dalam membangkitkan jiwa Nasionalis dan Patriotis mahasiswa ialah:
  - a) *Faktor Internal* (dari dalam diri mereka) yaitu melalui *peneladanan*, artinya Dosen menjadikan dirinya sebagai model dalam mewujudkan jiwa Nasionalis dan Patriotis tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
  - b) *Faktor Eksternal* (dari luar diri mereka), meliputi : (1) Pemilihan materi yang bervariasi, serta penggunaan metode dan media yang tepat dalam perkuliahan; (2) Menciptakan iklim perkuliahan yang mampu menumbuhkan rasa kesadaran bangsa dan bernegara Indonesia; (3) Memberikan pemahaman yang benar pada mahasiswa tentang sikap dan perilaku yang seharusnya dilakukan oleh mereka sebagai WNI yang baik

## **G. Kesimpulan dan Saran**

### **Kesimpulan :**

1. Faktor-faktor penyebab melemahnya jiwa Nasionalisme dan Patriotisme mahasiswa
  - a) *Faktor Internal* , antara lain : kurangnya pengetahuan mahasiswa terhadap sejarah perjuangan bangsa; tumbuhnya sikap individualistik dan hedonis, serta kekecewaan pada fenomena yang terjadi di negara kita
  - b) *Faktor Eksternal*, antara lain : pengaruh negatif era globalisasi dan modernisasi; tumbuhnya westernisasi, kurangnya even yang menampilkan budaya daerah; kurangnya peneladanan dari orang tua dan guru tentang perwujudan jiwa Nasionalisme dan Patriotisme dalam kehidupan sehari-hari
2. Andil Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sarana pendidikan demokrasi dalam membangkitkan Jiwa Nasionalis dan Patriotis Mahasiswa cukup besar dan signifikan, diantaranya untuk merefleksikan semangat juang para pahlawan, menjadi sarana pendidikan demokrasi yang baik bagi mahasiswa, agar menjadi seorang WNI yang baik
3. Upaya-upaya Dosen Mata Kuliah PKn untuk menjadikan Mata Kuliah PKn sebagai sarana pendidikan demokrasi dalam membangkitkan jiwa Nasionalis dan Pa-



triotis mahasiswa adalah :

- a) *Faktor Internal* yaitu melalui *peneladanan* dalam diri Dosen
- b) *Faktor Eksternal* meliputi: materi yang bervariasi, metode dan media yang tepat dalam perkuliahan PKn; menciptakan iklim perkuliahan yang mampu menumbuhkan rasa memiliki terhadap bangsa; memberikan pemahaman yang benar terhadap perilaku yang harus dilakukan mahasiswa sebagai seorang WNI yang baik

**Saran :**

1. Perlu ditingkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang sejarah perjuangan para pahlawan bangsa dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan
2. Perlu ditumbuhkan kemampuan maksimal mahasiswa untuk *memfilter* (menyaring) dampak negatif era globalisasi dan modernisasi (seperti sifat *individualistik, westernisasi, hedonis*) dengan peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
3. Perlu lebih dimaksimalkan peran Mata Kuliah PKn sebagai sarana pendidikan demokrasi di Indonesia, melalui kekonsistenan para Dosen-nya dalam menyampaikan materi yang bervariasi; pemakaian metode dan media yang sesuai
4. Perlu perhatian khusus dari pihak UPI, untuk segera menyesuaikan bobot sks untuk sejumlah Mata Kuliah yang termasuk ke dalam Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian, termasuk PKn (dari 2 sks menjadi 3 sks) sesuai SKEP Dirjen DIKTI No. 43/DIKTI/Kep/2006, tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi

2. Andil Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sarana pendidikan demokrasi dalam membangkitkan Jiwa Nasionalis dan Patriotis Mahasiswa cukup be-



sar dan signifikan, diantaranya untuk merefleksikan semangat juang para pahlawan bangsa yang tanpa pamrih dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa; menjadi sarana pendidikan demokrasi yang baik bagi mahasiswa, sehingga menjadi seorang Warga Negara Indonesia yang baik, yang dapat menyeimbangkan pelaksanaan hak dan kewajibannya serta mampu menjadi *patriot* bangsanya

3. Upaya-upaya yang dilakukan para Dosen Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan untuk menjadikan Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sarana pendidikan demokrasi dalam membangkitkan jiwa Nasionalis dan Patriotis mahasiswa adalah sebagai berikut :

a) *Faktor Internal* (dari dalam diri mereka) yaitu melalui *peneladanan*, artinya Dosen menjadikan dirinya sebagai model dalam mewujudkan jiwa Nasionalis dan Patriotis tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

b) *Faktor Eksternal* (dari luar diri mereka), meliputi hal-hal sebagai berikut :

- \* Pemilihan materi yang bervariasi, serta penggunaan metode dan media yang tepat dalam perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan
- \* Menciptakan iklim perkuliahan yang mampu menumbuhkan rasa kesadaran dan memiliki terhadap bangsa dan negara Indonesia
- \* Memberikan pemahaman yang benar atau kontribusi positif terhadap mahasiswa tentang sikap dan perilaku yang seharusnya dilakukan oleh mereka sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang baik, dalam menghadapi berbagai fenomena yang terjadi di sekitar kehidupan mereka.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kegiatan penelitian yang dilakukan akan diajukan sejumlah saran sebagai berikut :

1. Perlu ditingkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang sejarah perjuangan para pahlawan bangsa dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan, sehingga dapat membangkitkan jiwa Nasionalis dan Patriotis dalam diri mahasiswa
2. Perlu ditumbuhkan kemampuan yang lebih maksimal dalam diri mahasiswa untuk *memfilter* (menyaring) berbagai dampak negatif era globalisasi dan modernisasi (seperti sifat *individualistik*, *westernisasi*, *hedonis* dan sebagainya), diantaranya

dengan cara peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari

3. Perlu lebih dimaksimalkan peran Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sarana pendidikan demokrasi di Indonesia, melalui kekonsistenan para Dosen (Pengajar)-nya dalam mencoba menyampaikan materi secara lebih bervariasi, juga pemakaian metode/pendekatan serta media yang sesuai dengan karakteristik Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan
4. Perlu perhatian khusus dari pihak Universitas Pendidikan Indonesia, untuk segera menyesuaikan bobot sks untuk sejumlah Mata Kuliah yang termasuk ke dalam Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian, termasuk Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan didalamnya (dari 2 sks menjadi 3 sks), sesuai dengan SKEP Dirjen DIKTI No. 43/DIKTI/Kep/2006, tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi

.....